

BAB IV

PENYELENGGARAAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintahan Daerah yang saling terkait dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Lingkungan Hidup
4. Pekerjaan Umum
5. Penataan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan
7. Perumahan
8. Kepemudaan dan Olah Raga

9. Penanaman Modal
10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
11. Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Ketenagakerjaan
13. Ketahanan Pangan
14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15. Keluarga Berencana
16. Perhubungan
17. Komunikasi dan Informatika
18. Pertanahan
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Sosial
23. Kebudayaan
24. Statistik
25. Kearsipan
26. Perpustakaan

Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pertanian
3. Kehutanan
4. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Pariwisata
6. Industri
7. Perdagangan
8. Ketransmigrasian

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berikut diuraikan capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur yang meliputi Urusan Wajib

dan Urusan Pilihan dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan 5 (Lima) Misi Pembangunan.

Tabel 4.1
Matriks Penyelenggaraan Urusan Wajib
dan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014	PELAKSANA URUSAN WAJIB	PELAKSANA URUSAN PILIHAN
Misi 1 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi	Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Badan Perpustakaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 	-
	Prioritas 2 : Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kesehatan RSUD AW. Sjahranie RSUD Kanujoso RSUD Tarakan RSJ Atma Husada 	-
	Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 	-
Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan	Prioritas 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Dinas Sosial Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Dinas Pekerjaan Umum (Cipta Karya) Biro Ekonomi Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Ketenagakerjaan) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Kehutanan Dinas Pertanian Dinas Peternakan
	Prioritas 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disperindagkop (UMKM dan Koperasi) Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Sosial 	-

MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014	PELAKSANA URUSAN WAJIB	PELAKSANA URUSAN PILIHAN
	Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Biro Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> Disperindagkop (perdagangan dan industri)
	Prioritas 6 : Transformasi Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Peternakan Dinas Perkebunan Disbudpar Disperindagkop (perdagangan dan industri)
	Prioritas 7 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan	-	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Peternakan
	Prioritas 8 : Pengembangan Agribisnis	-	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Peternakan Dinas Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Disperindagkop (industri)
	Prioritas 9 : Penguatan Cadangan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Badan Ketahanan Pangan Dinas Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air) 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pertanian Dinas Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan Disnakertrans (Transmigrasi)
Misi 3 : Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata	Prioritas 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perhubungan Diskominfo 	-
Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik	Prioritas 11 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Biro Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Biro Keuangan Biro Pemerintahan Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat Wilayah Diskominfo Bappeda Kesbangpol 	-

MISI	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2014	PELAKSANA URUSAN WAJIB	PELAKSANA URUSAN PILIHAN
Misi 5 : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim	Prioritas 12: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum (Penataan Ruang) • Bappeda 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan • Distamben • Dinas Perkebunan

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2015

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi

Misi pertama ini dijabarkan dalam 1 (satu) tujuan yaitu “Meningkatkan kualitas SDM Kaltim” dan 5 (lima) sasaran yaitu (1) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (2) Meningkatkan Angka Melek Huruf, (3) Meningkatnya Rata-Rata Lama Sekolah, (4) Meningkatnya Angka Harapan Hidup, (5) Meningkatnya Pendapatan Perkapita.

Capaian sasaran tujuan pada misi pertama yaitu Meningkatkan kualitas SDM Kaltim sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya yang ditandai dengan realisasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu dari 73,21 menjadi 73,82 pada tahun 2015, atau naik peringkat ke 3 secara nasional dari peringkat 4 setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta






Dari empat komposit pembentuk IPM yaitu 1) angka melek huruf, 2) rata-rata lama sekolah, 3) angka harapan hidup dan 4) pendapatan per kapita, maka dapat disampaikan sebagai berikut :

- Komposit pertama dan kedua dari IPM yaitu angka melek huruf yang ditargetkan pada tahun 2015 sebesar 98,50 % realisasinya sudah melampaui target yang diinginkan yaitu sebesar 98,75 %, rata-rata lama sekolah di tahun 2015 realisasi mencapai 9,60 tahun dari

target 10,5 tahun atau belum mencapai target. Hal ini disebabkan kondisi daerah di Kalimantan Timur terdiri dari daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil yang belum dapat mengakses pelayanan pendidikan karena keterbatasan transportasi, informasi, komunikasi dan minimnya tenaga pendidik yang berminat tinggal di daerah tersebut.

- Komposit ketiga dari IPM yaitu Angka Harapan Hidup pada tahun 2015 ditargetkan 71,75 tahun, realisasinya telah melampaui target yaitu 73,62 tahun. Demikian juga untuk komposit keempat dari IPM yaitu Pendapatan Per Kapita target tahun 2015 adalah Rp. 48,65 juta realisasinya telah melampaui target sebesar Rp. 61,17 juta.

Tabel 4.2
Capaian Sasaran Misi 1 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD 2015	CAPAIAN 2014	CAPAIAN 2015	STATUS CAPAIAN	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,14 (Metode Lama)	73,82 (Metode Baru)	73,82*	Tercapai	
2.	Angka Melek Huruf (persen)	98,50	98,75	98,75	Tercapai	
3.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,50	9,60	9,60	Belum Tercapai	
4.	Angka Harapan Hidup (tahun)	71,75	73,62	73,62	Tercapai	
5.	Pendapatan Per Kapita (juta rupiah)	Rp 48,65 juta	Rp 61,17 juta	Rp 61,17 juta	Tercapai	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, Evaluasi Tahun Kedua RPJMD Kalimantan Timur TA 2013-2018, dan BPS Provinsi Kalimantan Timur,
Catatan *) = angka sementara

Upaya pencapaian target misi Pertama ini ditempuh melalui **Prioritas 1: Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan; Prioritas 2: Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan; dan Prioritas 5: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**. Secara umum capaian kinerja untuk misi pertama sangat menggembirakan dan rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan.

1.1. Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

1.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan melalui 10 program dan 34 kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 310,26 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah angka melek huruf 98,75% melebihi dari target 98,50% dan rata-rata lama sekolah 9,6 tahun yang tidak mencapai target 10,5 tahun.

Tabel 4.3
Program Kegiatan Prioritas
Terkait Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan

Prioritas 1 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Pendidikan Non Formal		DINAS PENDIDIKAN
	1.1	Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal	
	1.2	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	
	1.3	Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	
	1.4	Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal	
	1.5	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
	2.1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	
	2.2	Pengadaan Meubelair Sekolah	
	2.3	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar Dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	
3	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		
	3.1	Pembangunan Gedung Sekolah	
	3.2	Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa	

	3.3	Penyelenggaraan Ujian SD	DINAS PENDIDIKAN
	3.4	Pengadaan Ijazah SD, Penghimpunan Dan Pemusnahan Blanko	
4	Program Pendidikan Menengah		
	4.1	Pembangunan Gedung Sekolah	
	4.2	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	
	4.3	Penyelenggaraan Paket C Setara SMU	
	4.4	Penyebarluasan Dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Menengah	
	4.5	Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah	
	4.6	Pembinaan Porseni Smp	
	4.7	Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	
	4.8	Lomba Dan Pertandingan Tingkat SMA	
	4.9	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	
	4.10	Pembangunan Education Centre	
5	Program Peningkatan Pendidikan dan PengembanganSumber Daya Masyarakat		
	5.1	Peningkatan Pendidikan Dan Pengembangan SDM Melalui Beasiswa	
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
	6.1	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	
	6.2	Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
	6.3	Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Program Profesi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	
	6.4	Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi (Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru)	
7	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan		BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	7.1	Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	

	7.2	Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat	BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH
	7.3	Pengelolaan Karya Cetak Dan Karya Rekam	
8	Program Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
	8.1	Advokasi Dan Fasilitas Penetapan Kab/Kota Pengembang Menuju Kota Layak Anak	
	8.2	Pemenuhan Kebutuhan Salah Satu Cluster Hak Anak	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan” pada tahun 2015 rata-rata mencapai realisasi keuangan 93,54% dan realisasi fisik 93,88%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian peningkatan mutu pendidikan, adalah sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan :
 - Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal melalui Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Pengelola PAUD Tingkat Dasar sebanyak 270 orang, lomba gugus PAUD/Lembaga PAUD/Bunda PAUD tingkat provinsi sebanyak 22 orang.
 - Pengembangan Pendidikan Keaksaraan melalui Pendidikan Keaksaraan Fungsional untuk 47 kelompok, Pelatihan instruktur mengemudi lembaga kursus dan

pelatihan untuk 56 Orang, Motivasi Kegiatan Belajar pada Hari Aksara Indonesia untuk 960 Orang.

- Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui pelatihan keahlian Teknisi HP untuk 80 Orang, Pelatihan keahlian mekanik sepeda motor untuk 75 Orang, Pelatihan keahlian perhotelan untuk 60 Orang.
- Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Non Formal melalui Rakor perencanaan program PAUDNI untuk 56 Orang.
- Publikasi Dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal melalui Kegiatan apresiasi PTK PAUDNI di 10 Kabupaten/Kota.

2. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan kegiatan :

- Pengadaan alat praktik dan peraga siswa sebanyak 14 paket.
- Pengadaan meubelair di 16 sekolah.
- Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini berupa Workshop kurikulum TK, evaluasi akhir pelaksanaan kurikulum dan bahan ajar TK, Rakor tim sekretariat bersama PAUD.

3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, melalui kegiatan :

- Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa melalui Penyertaan 1,600 Orang dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), 298 Orang dalam olimpiade siswa, 492 Orang dalam kreativitas siswa.
- Penyelenggaraan Ujian SD berupa pengadaan naskah soal ujian SD di 10 kabupaten/kota.
- Pengadaan Ijazah SD/SMP/SMA/SMK, Penghimpunan dan Pemusnahan Blanko di 10 Kabupaten/Kota.

- Pembangunan gedung sekolah
4. Program Pendidikan Menengah, melalui kegiatan :
- Pembangunan gedung sekolah SMA Unggulan sebanyak 3 unit masing-masing di Berau, SMA 5 Samarinda, dan SMA Unggulan Samarinda.
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa untuk workshop education centre sebanyak 59 Set, Pengadaan Buku Ensiklopedia untuk perpustakaan Dikmen sebanyak 10 Paket/judul, Pengadaan Meubelair untuk perkuliahan mahasiswa ISBI sebanyak 16 Paket/542 buah, Pengadaan Buku/modul pendidikan karakter (Pendidikan lalu lintas) sebanyak 13 Paket/judul, Pengadaan Alat praktik dan peraga siswa sebanyak 5 Paket.
 - Penyelenggaraan paket C setara SMU melalui Pembelajaran Paket C setara SMU sebanyak 10 kelompok/ 30 orang;
 - Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah melalui Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK Tingkat Provinsi sebanyak 200 orang peserta dari 10 Kabupaten/Kota; Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Tingkat Provinsi sebanyak 200 Orang peserta dari 10 Kabupaten/Kota; Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Tingkat Provinsi sebanyak 200 orang peserta dari 10 Kabupaten/Kota; Olimpiade Sains Nasional (OST) SMK Tingkat Provinsi sebanyak 100 orang peserta dari 10 Kabupaten/Kota; Liga Pendidikan Indonesia/LPI Tingkat Provinsi sebanyak 200 orang peserta dari 10 Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah melalui Rakerda UKS sebanyak 40 Orang peserta; Lomba Sekolah Sehat (LSS) sebanyak 50

Orang peserta; dan Kegiatan Evaluasi & Koordinasi UKS sebanyak 40 Orang peserta.

- Pembinaan Porseni SMP melalui Porseni SMP Tingkat Nasional sebanyak 50 Orang peserta; Porseni SMA Tingkat Nasional sebanyak 30 Orang peserta; dan Porseni SMALB Tingkat Nasional sebanyak 10 Orang peserta.
- Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi melalui Pemberian Penghargaan ke SMA Mitra PASIAD dan melanjutkan studi keluar negeri sebanyak 899 Siswa.
- Lomba dan Pertandingan Tingkat SMA melalui Lomba Kegiatan Pekan Olahraga SMP sebanyak 250 Orang peserta/pendamping; Lomba Kegiatan Pekan Seni SMP 150 Orang peserta/pendamping; Lomba Kegiatan Pekan Olahraga SMA sebanyak 150 Orang peserta/pendamping; Lomba Kegiatan Pekan Seni SMA sebanyak 150 Orang peserta/pendamping; Lomba Kegiatan Pekan Olahraga SMALB sebanyak 130 Orang peserta/pendamping; Lomba Kegiatan Pekan Seni SMALB sebanyak 110 Orang peserta/pendamping.
- Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa melalui kegiatan olimpiade sains SMP sebanyak 158 Orang peserta/pendamping; kegiatan lomba PAI sebanyak 120 Orang peserta/pendamping; kegiatan lomojari sebanyak 36 Orang peserta/pendamping; kegiatan olimpiade sains SMA sebanyak 310 Orang peserta/pendamping; kegiatan cerdas cermat UUD 1945 sebanyak 64 Orang peserta/pendamping; kegiatan cerdas cermat lalu lintas sebanyak 21 Orang peserta/pendamping; kegiatan olimpiade sains SMALB sebanyak 12 Orang peserta/pendamping.
- Pembangunan Education Centre melalui Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang; dan Pembuatan Taman.

5. Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Melalui Pemberian Beasiswa sebanyak 41,824 orang;
6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, melalui kegiatan :
 - Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi melalui Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 12 pelatihan.
 - Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui Penghargaan Guru Berprestasi sebanyak 298 Orang, Pemilihan Guru Berjasa sebanyak 194 Orang, Kegiatan Porseni Guru TK Tingkat Provinsi sebanyak 300 orang; Kegiatan Diklat dan Workshop Pengembangan Bahan Ajar PTK-PAUDNI (Pendidik dan Tenaga Kependidikan-Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal) sebanyak 309 Orang.
 - Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan perencanaan dan pengendalian dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi jabatan fungsional, pedampingan hukum dan sasaran kinerja pegawai sebanyak 350 orang.
 - Pelatihan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi (Kegiatan Kualifikasi Pendidikan Guru) melalui kegiatan beasiswa tugas belajar S1 sebanyak 2.031 orang; kegiatan beasiswa tugas belajar S2 sebanyak 455 orang.
7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, melalui kegiatan :
 - Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar dengan Pengadaan ISO 9001 2008 sebanyak 1 Dokumen,

Pengadaan aplikasi Sistem IT Database Perpustakaan Terintegrasi di 11 Perpustakaan, Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Layanan Perpustakaan, Penyusunan Survei Kebutuhan Bahan Pustaka Masyarakat, Pembinaan Minat Baca untuk Anak Usia Dini Melalui Story Telling sebanyak 1,000 Orang, Pengadaan Stan Pameran Perpustakaan sebanyak 5 Stan, Asesoris Ruang Layanan Anak-Anak sebanyak 10 Set, Pengadaan Printer sebanyak 1 Unit dan Komputer PC sebanyak 4 Unit, Buku Ilmu Pengetahuan Umum untuk Perpustakaan Keliling sebanyak 1,173 Eksemplar. Target pemustaka yang mendayagunakan jasa layanan Badan Perpustakaan Prov. Kaltim pada tahun 2015 adalah sebanyak 211.721 orang dengan realisasi sebanyak 211.760 orang atau 100,02%

- Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat dengan Jumlah Perpustakaan Kab/Kota yang diverifikasi untuk mendapatkan panji keberhasilan pembangunan di bidang Perpustakaan sebanyak 9 Perpustakaan, Penyelenggaraan Rakor Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca, Diklat Perpustakaan Berbasis IT sebanyak 30 Orang, Diklat Orientasi Perpustakaan Pola 110 Jam sebanyak 27 Orang, Workshop Penulisan Karya Ilmiah Bagi Pustakawan sebanyak 22 Orang, Rakor Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca sebanyak 50 Orang, Temu Konsultasi Pustakawan sebanyak 100 Orang, Data Nomor Pokok Perpustakaan sebanyak 1 Dokumen, Buku Ilmu Pengetahuan Umum untuk Kabupaten/Kota sebanyak 22,500 Eksemplar, Rak Buku Untuk Perpustakaan Kabupaten/Kota sebanyak 27 Unit, Diklat Perpustakaan Berbasis IT, Orientasi

Perpustakaan Pola 110 Jam, Workshop Penulisan Karya Ilmiah Bagi Pustakawan, Penyelenggaraan Rakor Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca dan Temu Konsultasi Pustakawan, Perpustakaan berprestasi yang mendapatkan dana pembinaan sebanyak 5 Perpustakaan;

- Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam melalui Pengadaan Bahan Pustaka E-Book sebanyak 969 Judul/969 eksemplar, Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum sebanyak 1,114 Eksemplar/288 judul, Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan sebanyak 528 Eksemplar/133 judul, Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial sebanyak 848 Eksemplar/212 judul, Pengadaan Buku Politik dan Ketatanegaraan sebanyak 924 Eksemplar/233 judul, Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra sebanyak 964 Eksemplar/254 judul, Pengadaan Buku Kamus Bahasa sebanyak 164 Eksemplar/83 judul, Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebanyak 433 Eksemplar/109 judul, Penyelenggaraan Rakor Center Of Excellent, Pengadaan Kamera Elektronik sebanyak 1 Unit, Survey Bahan Perpustakaan sebanyak 2 kali, Alih Media Koleksi Konten Lokal sebanyak 250 judul, Penjilidan majalah dan surat kabar sebanyak 60 bundel, Perbaikan Bahan Perpustakaan sebanyak 100 eksemplar, Penyusunan Literatur Sekunder sebanyak 3,500 entri, Pengolahan Bahan Perpustakaan sebanyak 1,700 judul.

8. Program Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, melalui kegiatan :

- Advokasi dan fasilitasi penetapan Kab/Kota Pengembang menuju Kota Layak Anak, dengan kabupaten/kota sebagai pengembang kab/kota layak anak sebanyak 1 kabupaten/kota yaitu Kabupaten

Penajam Paser Utara, pemenang lomba balita sehat yang mendapatkan dana pembinaan sebanyak 6 orang balita, pemenang lomba penggalan bakat anak yang mendapatkan dana pembinaan sebanyak 21 orang, pengadaan pakaian seragam Hari Anak Nasional (HAN) sebanyak 635 stel (575 HAN, 30 FAN Tingkat Provinsi dan 30 FAN Tingkat Nasional);

- Pemenuhan kebutuhan salah satu cluster hak anak, dengan menyusun laporan advokasi penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah sebanyak 1 dokumen, Data anak usia sekolah yang tidak bersekolah sebanyak 1 dokumen, dan Perjanjian kerjasama MoU penanganan anak usia sekolah sebanyak 1 MoU.

1.1.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Bantuan beasiswa yang ditargetkan untuk 47.650 siswa di 10 Kabupaten/Kota hanya terealisasi sebesar 41.824 siswa atau 87,77 %, dikarenakan belum semua sekolah memiliki data siswa secara online sehingga membutuhkan waktu lama untuk validasi data calon penerima beasiswa.
2. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2015 pelayanan perpustakaan masih belum optimal dan terjadi kecenderungan penurunan jumlah pengunjung disebabkan oleh Deteksi pengunjung pada sistem buku tamu elektronik belum berjalan dengan optimal, keterbatasan kapasitas bandwidth untuk mendukung kecepatan akses layanan internet masyarakat pengguna layanan perpustakaan, dan keterbatasan ruang baca untuk menampung jumlah pengunjung yang semakin meningkat.
3. Permasalahan Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak :

- Belum tersedianya data anak putus sekolah secara terpilah Laki-laki dan Perempuan.
- Semakin kompleksnya permasalahan anak di Prov. Kaltim
- Belum adanya regulasi atau Peraturan Daerah yang mengakomodir permasalahan anak putus sekolah.
- Belum adanya data yang akurat di Dinas Pendidikan mengenai jumlah siswa sekolah.
- Orang tua dengan ABK banyak yang malu menyekolahkan anaknya.
- Belum tersedianya beasiswa khusus untuk membiayai anak putus sekolah kembali ke sekolah.
- Untuk Anak Berkebutuhan Khusus, masyarakat kesulitan mengakses SLB karena lokasinya jauh dari rumah.

b. Solusi

1. Perlunya pengembangan sistem penyaluran beasiswa agar kuota yang telah ditetapkan 50.000 orang per tahun dapat terealisasi.
2. Untuk terus meningkatkan kinerja layanan pada Badan Perpustakaan pada tahun-tahun mendatang, maka akan dilakukan langkah-langkah berikut :
 - Mengoptimalkan fungsi buku tamu elektronik untuk mendeteksi tingkat kunjungan pemustaka
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi bahan pustaka
 - Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan perpustakaan melalui penyediaan ruang baca yang memadai, meningkatkan bandwidth internet, dan mengembangkan Portal Web Perpustakaan Digital Kaltim.
 - Optimalisasi layanan perpustakaan keliling

3. Solusi permasalahan Peningkatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak :

- Meningkatkan system pendataan/pemetaan anak putus sekolah di kabupaten/kota.
- Melakukan advokasi kepada Diknas, Dewan Pendidikan, dll untuk penanganan anak putus sekolah.
- MoU dengan SKPD terkait maupun lembaga-lembaga lain dalam penanganan anak putus sekolah.
- Memanfaatkan CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan untuk membantu pendataan anak putus sekolah.
- Memfasilitasi setiap sekolah untuk membuat data siswa secara online, dan data yang dimiliki hendaknya segera ditindaklanjuti agar siswa bisa kembali lagi ke sekolah dan menghindari permasalahan sosial lainnya.
- Memanfaatkan Kartu Indonesia Pintar untuk membantu penanganan anak putus sekolah.
- Melakukan upaya preventif melalui penyuluhan secara intensif kepada orang tua agar temotivasi dan memiliki kesadaran untuk memprioritaskan pendidikan anak-anaknya.

1.2. Prioritas 2 : Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Komposit IPM selanjutnya adalah bidang kesehatan yang ditunjukan dengan angka harapan hidup tahun 2015 telah mencapai 73,62 tahun melampaui target 71,75 tahun. Kenaikan angka harapan hidup di Kalimantan Timur karena Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

1.2.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 2 : Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dilaksanakan melalui 11 program dan 24 kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 82,572 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah angka harapan hidup 73,62% melebihi dari target 71,75%.

Tabel 4.4
Program Kegiatan Prioritas terkait
Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Prioritas 2 : Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan		
No	Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya	DINAS KESEHATAN
	Melalui Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota	
2	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RSP/RSM	
2.1	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	DINAS KESEHATAN, RSUD TARAKAN, RSUD A. WAHAB SYAHRANIE, RSUD KANUJOSO
2.2	Pembangunan Rumah Sakit	RSUD A. WAHAB SYAHRANIE, RSUD KANUJOSO
2.3	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain)	RSUD KANUJOSO
2.4	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	RSJD ATMA HUSADA
3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
3.1	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	
3.2	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	
3.3	Peningkatan Peran Instansi Dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Dalam Memasyarakatkan Pola Hidup Sehat	DINAS KESEHATAN
4	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	

	4.1	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	
	4.2	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	
5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
	5.1	Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	
	5.2	Peningkatan Surveillance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah	
	5.3	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	
6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		DINAS KESEHATAN
	6.1	Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	
	6.2	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	
	6.3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar	
	6.4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	
	6.5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengembangan	
7	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		DINAS KESEHATAN
	7.1	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	
	7.2	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	
8	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan		
	8.1	Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu (Kartu Sehat)	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan” pada tahun 2015 rata-rata mencapai realisasi keuangan 89,53% dan realisasi fisik 92,50%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian peningkatan kualitas layanan kesehatan, adalah sebagai berikut :

1. Program pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM, melalui kegiatan :
 - Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit berupa pengadaan Alat Opthical Biometri sebanyak 1 Unit dan Asesorisnya; pengadaan alat olahraga/tes deteksi dini sebanyak 16 jenis dan pengadaan alat kebugaran Fitness sebanyak 9 jenis.
 - Pembangunan Gudang Induk dan Arsip di RSUD. Kanujoso Dajtiwibowo Balikpapan; Gedung Radioterapy, Gedung Laboratorium dan Bank Darah di RSUD. AW. Sjahranie Samarinda.
 - Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit dan alat penunjang keamanan alat kesehatan meningkatkan pelayanan Laundry Rumah Sakit di RSUD. Kanujoso Dajtiwibowo Balikpapan.
 - Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit.
2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, melalui kegiatan : Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat melalui peningkatan peran instansi dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dalam memasyarakatkan pola hidup sehat, pembinaan Posyandu, Desa Siaga dan Rumah Tangga PHBS serta penyelenggaraan bimtek Promkes RS di 10 kabupaten/kota; pelaksanaan Rapat Pimpinan Daerah Majelis Pembimbing dan bimbingan teknis pengelola Saka Bakti Husada.
3. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan, melalui kegiatan : Perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan masyarakat kepada 3.419.956 jiwa (99%), telah melampaui target 97% proporsi penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan. Pertambahan cakupan yang paling besar adalah

Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD mencapai 265.838 jiwa. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/pekerja mandiri dari 118.265 jiwa menjadi 375.615 jiwa, berarti naik sebesar 200% lebih. Demikian pula penyelenggaraan Jamkesprov yang diselenggarakan oleh UPTD Jamkesprov Kaltim menjamin masyarakat miskin yang mempunyai kartu Jamkesprov maupun non kartu seperti Maskin Lapas, Rutan dan Panti sosial yang tidak bekerjasama dengan Jamkesda, SKTM selektif, dan Maskin gangguan jiwa.

4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, melalui kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah secara terpadu, dengan capaian pada tahun 2015; prevalensi HIV sebesar 0,2, meskipun angka ini masih dibawah target < 1; proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan antiretroviral mencapai 83,83% dan masih dibawah target 98%; prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk mencapai 93 per 100.000 penduduk dan masih dibawah target 223 per 100.000 penduduk; Persentase keberhasilan TB mencapai 84,7% dengan Proporsi kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS sebesar 30%; Annual parasite incidence (API) Malaria per 100.000 penduduk target 1,4 dan capaian 0,28.
5. Program Pengendalian Penyakit tidak menular (PTM) melalui kegiatan Peningkatan Surveillance secara terpadu, imunisasi dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM), dengan temuan kasus baru Hipertensi 23.882 kasus lebih rendah dari 29.880 kasus pada tahun 2014, Jantung Koroner 483 kasus 805 kasus pada tahun 2014: Diabetes Millitus 6.051 kasus lebih rendah dari 7.767 kasus pada tahun 2014, kasus stroke 407 kasus lebih rendah dari 559 kasus pada tahun 2014.
6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, melalui kegiatan;

- Fasilitas pembangunan 4 Rumah Sakit Pratama yaitu rumah sakit pratama di Talisayan Kabupaten Berau, Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, dan Linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat, Batu Engau di Kabupaten Paser.
- Upaya pendampingan akreditasi 180 puskesmas yang ada di seluruh kabupaten kota, 133 diantaranya adalah Puskesmas 24 jam, 76 Puskesmas telah memenuhi standar dan terdapat 5 Puskesmas yang telah mendapat sertifikat terakreditasi. Di samping itu juga pendampingan akreditasi 46 Rumah sakit se Kalimantan Timur baik milik pemerintah dan swasta, 3 (tiga) diantaranya telah mendapatkan akreditasi yaitu RSUD. AW syahrane Samarinda, RSUD Kudungga Sangata dan RS SMC Samarinda.
- Peningkatan pelayanan kesehatan dasar berupa Penilaian Puskesmas berprestasi, Pelayanan kesehatan udara/ dokter terbang;; Pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan udara/dokter terbang di Kabupaten Mahakam Ulu & Kabupaten Berau.
- Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dengan melakukan Pembinaan dan selft assesment Rumah Sakit Sayang Ibu di 10 Kab/kota.

1.2.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Masih adanya fasilitas kesehatan yang sulit terjangkau oleh masyarakat karena sulitnya akses transportasi menuju ke fasilitas kesehatan tersebut.
2. Belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan (Dokter, perawat & Bidan) terutama pada daerah-daerah terpencil/perbatasan, hal ini dapat disebabkan karena minimnya fasilitas di daerah tersebut, insentif yang tidak memadai dan sulitnya akses menuju daerah tersebut

sehingga tenaga kesehatan enggan ditugaskan ke daerah-daerah DTPK.

3. Kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh perilaku/gaya hidup seseorang, upaya merubah perilaku inilah yang masih perlu perhatian bersama. Budaya, kebiasaan, pola asuh, akses terhadap informasi, status sosial ekonomi, pendidikan juga sangat mempengaruhi perilaku pola hidup sehat.
4. Masih rendahnya standar kelulusan paripurna.
5. Masih terbatasnya fasilitas alat kesehatan, penunjang medik, serta fasilitas sarana dan parasarana kesehatan.

b. Solusi

1. Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Daerah Tertencil, Perbatasan dan Kepulauan salah satunya dilakukan dengan pelayanan kesehatan dokter terbang yang melibatkan dokter spesialis untuk menjangkau daerah tersebut dan pembangunan rumah sakit pratama. Sedangkan peranan lintas sektor yang lain sangat diharapkan guna memperbaiki akses/ jalur transportasi menuju fasilitas kesehatan agar memudahkan masyarakat untuk datang ke fasilitas kesehatan terutama fasilitas kesehatan dasar yang ada.
2. Pemenuhan tenaga kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) melalui advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan anggaran dalam rekrutment tenaga kesehatan strategis diantaranya adalah dokter, bidan dan perawat, dan mengupayakan agar Kementerian Kesehatan menyediakan tenaga kesehatan berbasis Team Base yaitu Tim Nusantara Sehat yang ditempatkan di Puskesmas Long Apari, Long Pahangai di Kabupaten Mahakam Ulu dan Puskesmas Maratua di Kabupaten Berau, serta tenaga kesehatan yang dikontrak melalui anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten

untuk ditempatkan di daerah terpencil maupun sangat terpencil.

3. Penguatan Advokasi ke kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan Peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesehatannya melalui penerapan pola hidup bersih sehat (PHBS).
4. Meningkatkan penyediaan alat kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

1.3. Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan merupakan salah satu komponen upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia, yang diukur melalui peningkatan pendapatan perkapita.

Sasaran prioritas ini meliputi; Meningkatnya pendapatan perkapita dan Meningkatnya daya beli masyarakat. Peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) tidak terlepas dari adanya peningkatan komposit daya beli masyarakat melalui pendapatan per kapita yang telah pula mencapai Rp 61,17 juta melampaui target Rp 48,65 juta di tahun 2015.

1.3.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dilaksanakan melalui 3 program dan 16 kegiatan prioritas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,571 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah pendapatan per kapita Rp 61,17 juta melebihi dari target Rp 48,65 juta.

Tabel 4.5.
Program Kegiatan Prioritas
Terkait Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan		
No	Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS
1.1	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
1.2	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan	
1.3	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	
1.4	Pembinaan Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	
1.5	Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan	
2	Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan	DISNAKERTRANS
2.1	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	
2.2	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	
2.3	Pemeriksaan Dan Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan Secara Normatif	
2.4	Pembinaan, Pengawasan, Pemeriksaan Dan Pengujian Peralatan Di Perusahaan	
2.5	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pekerja/Buruh	
2.6	Pembinaan Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan Pada Pemberi Pekerja Dan Pekerja	
3	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
3.1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	
3.2	Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender	

	3.3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
	3.4	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usah Abagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
	3.5	Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan Dibidang Pembangunan

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Pengembangan Ekonomi Kerakyatan” pada tahun 2015 rata-rata mencapai realisasi keuangan 88,11% dan realisasi fisik 93,45%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian pengembangan ekonomi kerakyatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, melalui kegiatan : Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan penyelesaian kasus hubungan industrial (HI) sebanyak 37 Kasus; Penyelenggaraan Temu Konsultasi Mediator; memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan industrial; Pengadaan Data Base Hubungan Industrial dan Kepesertaan Jamsostek/ BPJS Ketenagakerjaan; Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan melakukan kunjungan perusahaan; Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja di 200 perusahaan; Bakti Sosial dalam rangka Mayday; Deteksi Dini Permasalahan Hubungan Industrial; Peningkatan Fungsi-Fungsi Lembaga-Lembaga Ketenagakerjaan Tripartit (Pengusaha, Pemerintah,

Pekerja) dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit (Pengusaha dan Pekerja) serta Dewan Pengupahan.

2. Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan, melalui kegiatan :

- Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Pembinaan Penerapan Kesehatan Lingkungan Kerja di Perusahaan; Pencanangan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); Pembentukan dan Pelantikan P2K3 di Perusahaan sebanyak 12 Organisasi; Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di 22 Perusahaan; Penilaian Pemberian Penghargaan Pembinaan dan Pencegahan HIV / AIDS terhadap 2 perusahaan; Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Tempat Kerja di 2 perusahaan; Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program Kerja dan Data Kesehatan dan Lingkungan Kerja di 6 perusahaan.
- Pemeriksaan dan Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan Secara Normatif dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pengawasan dan Kegiatan Tim Penanganan Kasus Ketenagakerjaan sebanyak 7 kasus.
- Pembinaan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan di Perusahaan dengan melakukan Riksa Uji Nilai Ambang Batas (NAB) di Lingkungan Kerja di 8 perusahaan; Riksa Uji Peralatan Kerja di Perusahaan, Data Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan Data Kepersertaan Jamsostek (BPJS) dan Perusahaan di Kaltim.
- Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pekerja/Buruh dengan melaksanakan Bimtek Hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pendamping Tenaga Kerja Asing (TKA) sebanyak 50 Orang dan Pelatihan Hygiene Perusahaan, Kesehatan dan

Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Paramedis di Perusahaan sebanyak 50 Orang .

- Pembinaan Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan pada Pemberi Pekerja dan Pekerja melalui Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan di 12 perusahaan; Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan dan Penanggulangan (P2 HIV/AIDS) dan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Tempat Kerja sebanyak 50 Orang; melaksanakan Temu Teknis Mekanisme Hak Pekerja Terkait BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 50 Orang; Penilaian Zero Accident pada 13 Perusahaan dan melaksanakan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di 16 perusahaan.
3. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, melalui kegiatan : Pembinaan organisasi perempuan P2WKSS, GSI, RSSI dan perusahaan terbaik pembina nakerwan di kab/kota sebanyak 40 lembaga; dan pemberian bantuan dana pembinaan kepada 24 lembaga pemberdayaan perempuan berprestasi; menyusun kajian pembangunan berbasis gender sebanyak 3 dokumen; pengukuhan pasangan keluarga sakinah sebanyak 6 pasangan; pelatihan dan pembinaan pengelola UPPKS sebanyak 12 kelompok; bimbingan manajemen usaha bagi 700 perempuan dalam mengelola usaha di 7 kabupaten/kota; pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan.

1.3.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Penetapan Upah Minimum Provinsi belum berdasarkan Undang-Undang 78 tahun 2015.

2. Kurangnya tenaga Fungsional Pengawasan dan lokasi perusahaan yang penyebarannya/jangkauannya terlalu luas, sementara yang tersedia saat ini 59 dan kebutuhannya kurang lebih 75 tenaga fungsional
3. Kurangnya komitmen di jajaran kecamatan/kelurahan terhadap capaian tujuan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
4. Belum tersedianya regulasi yang responsif terhadap tenaga kerja perempuan dan perlindungan anak.

b. Solusi

1. Perlu penambahan tenaga fungsional pengawas bidang ketenagakerjaan,.
2. Mengembalikan tanggungjawab fungsi kepada SKPD masing-masing secara berjenjang dalam upaya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.



Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan









Misi kedua “Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan” menekankan pada dua tujuan yaitu “Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat” dengan sasaran 1) Menurunnya tingkat kemiskinan, 2) Menurunnya Indeks Gini, 3) Menurunnya tingkat pengangguran, 4) Meningkatnya daya beli masyarakat dan tujuan kedua yaitu “meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau” dengan sasaran 1) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas, 2) Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas, 3) Tercapainya swasembada pangan, 4) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan.

Capaian indikator makro pembangunan dalam rangka menurunkan angka pengangguran pada tahun 2015 telah mencapai 7,50% atau lebih rendah dari capaian pada tahun 2014 yaitu 7,54%, namun belum mencapai target tahun 2015 yaitu sebesar 7%. Akan tetapi capaian indikator pembangunan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Timur mencapai 6,23% dan belum mencapai target 5,75% pada tahun 2015. Belum tercapainya target tersebut disebabkan oleh adanya migrasi penduduk dari luar Kalimantan Timur yang pada umumnya berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan kerja serta sulit mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadikan jumlah penduduk miskin semakin bertambah.

Pelaksanaan Misi 2 pembangunan di Kalimantan Timur dijabarkan melalui upaya pencapaian Prioritas 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan; Prioritas 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan; Prioritas 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi; Prioritas 7 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan; Prioritas 8 : Pengembangan Agrobisnis dan Prioritas 9 : Penguatan Cadangan Pangan/Peningkatan Produksi Pangan.

Tabel 4.6.
Capaian Sasaran Misi 2 : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumberdaya Alam dan Energi Terbarukan

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2015	CAPAIAN TAHUN 2015	STATUS CAPAIAN	
1	Tingkat Kemiskinan	5,75 %	6,23 %	Akan Tercapai (On Track)	
2	Tingkat Pengangguran	7,00 %	7,50 %	Akan Tercapai (On Track)	
3	Tingkat Inflasi	6,30+1	3,8 %	Tercapai (achieve)	

4	Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity)	Rp 724.450	Rp 11,02 juta	Tercapai (achieve)	
5	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,34	0,3332	Tercapai (achieve)	
6	Pertumbuhan Ekonomi				
	- Migas	3,2 - 3,7	-1,46	Tidak Tercapai (Off Track)	
	- Non Migas	7,0 - 7,3	-1,63	Tidak Tercapai (Off Track)	
	- Non Migas & Non Batubara	7,7 - 8,0	4,14	Akan Tercapai (On Track)	
7	Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	7 %	7,34 %	Tercapai (achieve)	
8	Rasio Pemenuhan Beras	78	70,17	Tercapai (achieve)	
9	Bauran Energi baru terbarukan	1,12	1,01	Tercapai (achieve)	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, Evaluasi Tahun Kedua RPJMD Kalimantan Timur TA 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur

2.1. Prioritas 3: Percepatan Pengentasan Kemiskinan

2.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan melalui 9 program dan 15 kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 84,030 Miliar.

Capaian prioritas ini adalah tingkat kemiskinan 6,23% belum mencapai target penurunan hingga 5,75%.

Tabel 4.7.
Program Kegiatan Prioritas
terkait Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Prioritas 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan		DINAS PENDIDIKAN
	1.1	Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Miskin (SD/MI/SDLB, SMP/Mts/SMPLB, SMA/SMK/MA)	
	1.2	Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Di Perguruan Tinggi	
2	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan		DINAS KESEHATAN
	2.1	Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu (Kartu Sehat)	
3	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial Untuk Mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan		DINAS SOSIAL
	3.1	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	
	3.2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana, Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	
	3.3	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Dan PMKS Lainnya	
	3.4	Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Dan PMKS Lainnya	
4	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial		
	4.1	Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Dan PMKS Lainnya	
5	Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin)		BIRO EKONOMI
	5.1	Fasilitasi Penyaluran Raskin	
6	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat		BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	6.1	Peningkatan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
7	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan		BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
	7.1	Peningkatan Kewirausahaan Perempuan	
8	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

	8.1	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	
9	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sarana Dan Prasarana Dasar Permukiman		DINAS PEKERJAAN UMUM
	9.1	Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	
	9.2	Pembangunan Prasarana Dan Sarana Rumah Sederhana Sehat	
10	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Penanggulangan Bencana		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	10.1	Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	
	10.2	Fasilitasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Percepatan Pengentasan Kemiskinan” pada tahun 2015 rata-rata mencapai realisasi keuangan 91,99% dan realisasi fisik 94,69%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian percepatan pengentasan kemiskinan, adalah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan, melalui kegiatan : pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA) sebanyak 1.500 orang; dan pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi sebanyak 850 orang.
2. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan, melalui kegiatan : Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu (Kartu Sehat) melalui Proporsi penduduk miskin yang memiliki akses pelayanan kesehatan 70%; Bimbingan teknis lintas sektor & program pelayanan Gakin di 2 Kabupaten; Rapat koordinasi Yankes Gakin di Provinsi, pelayanan Dokter terbang di lokasi DTPK yaitu di Long Apari, Long pahangai Kabupaten Mahakam Ulu dan Maratua di Kabupaten Berau; dan Pelayanan Operasi Katarak untuk 1.000 pasien kurang mampu.

3. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengurangi indeks kedalaman kemiskinan, melalui kegiatan :

- Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan melalui Bantuan Tunai Bersyarat kepada 100 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki Ibu Hamil dan Anak Usia Sekolah di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara; Bantuan untuk Usaha Ekonomi Produktif kepada 100 RTSM.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS melalui pemberian Alat Bantu dan Permakanan Gizi untuk Lanjut Usia Terlantar diluar panti sebanyak 250 orang; Bantuan berupa alat bantu yang diberikan untuk 100 Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten/Kota. Kemudian Bantuan Permakanan Gizi untuk Lanjut Usia Terlantar diluar panti sebanyak 5 jenis barang di 9 Kabupaten/Kota sebanyak 150 orang.
- Pelatihan Keterampilan Berusaha di Warga Komunitas Adat Terpencil sebanyak (87 KK) 150 orang; Bantuan yang diberikan untuk warga KAT berupa : MCK (Mandi Cuci Kakus) di Kabupaten Paser Kecamatan Long Kali Desa Mungu Lokasi Sekulit.
- Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya melalui Bimbingan Sosial KUBE Fakir Miskin sebanyak (25 KUBE) 250 orang; Bantuan untuk Usaha Ekonomi Produktif (KUBE) Fakir Miskin di Kabupaten Berau dan Kota Samarinda; pelatihan keterampilan berusaha dan bantuan alat untuk usaha ekonomi produktif bagi 50 orang Wanita Rawan Sosial Ekonomi;

7. Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), melalui kegiatan: Fasilitasi Penyaluran Raskin kepada 122.930 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan realisasi penyaluran RASKIN

sebesar 20.208.960 kilogram atau 91,33% dari target 22.127.400 kilogram.

8. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat, melalui kegiatan : Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin dengan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi 3.152 jiwa (81.07 % dari target 3.888 jiwa) masyarakat miskin pedesaan mandiri melalui pelatihan keterampilan Posyantek dan Dana Stimulan Posyantek Percontohan untuk 15 Kelompok Posyantek.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan, melalui kegiatan Peningkatan Kewirausahaan Perempuan dalam bentuk advokasi dan fasilitasi kepada 250 orang pelaku usaha perempuan.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan, melalui kegiatan : Identifikasi kebutuhan pelatihan bagi 10.159 penduduk miskin di seluruh Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Timur.
13. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang sarana dan Prasarana Dasar Permukiman, melalui kegiatan : Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu dalam bentuk Pembangunan 355 Rumah Layak Huni; dan pembangunan prasarana dan sarana rumah sederhana sehat dalam bentuk jalan lingkungan.
14. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana, melalui kegiatan : Fasilitasi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat melalui Sosialisasi desa tangguh bencana; Pembekalan Fasilitator desa tangguh bencana 20 orang; Kajian dan Pemetaan Risiko Bencana Desa Tangguh Bencana; Pembentukan Relawan dan Forum Desa Tangguh; Terbentuknya 4 desa/kelurahan Tangguh Bencana ; Pembekalan Teknis Penanggulangan Bencana 60 orang Relawan Desa Tangguh Bencana; Rencana Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana; Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana Desa Tangguh Bencana.

2.1.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Permasalahan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat, adalah Keberadaan dan manfaat Posyantek belum diketahui oleh masyarakat, SKPD terkait, Akademisi dan pemerhati TTG, dan kurangnya pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan Posyantek dari Kabupaten/Kota
2. Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial, adalah:
 - Selain masih ditemukannya kurang cermatan dalam proses pendataan orang miskin sehingga terjadi *inclusion* dan *exclusion error*, ternyata data yang sudah di tetapkan valid pun masih belum dapat dioptimalkan sebagai basis data terpadu dalam program-program penanganan kemiskinan oleh semua sektor sehingga terjadi adanya pelambatan proses pengentasan kemiskinan.
 - Mekanisme koordinasi penanganan kemiskinan belum berjalan optimal.
 - Struktur anggaran pembangunan yang belum seimbang antara pertumbuhan ekonomi yang berjalan lambat dengan cepatnya penambahan permasalahan kesejahteraan sosial.
3. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum 100% masyarakatnya tercover BPJS, sehingga masih memerlukan bantuan jaminan kesehatan melalui UPTD Jamkesprov.
4. Permasalahan terkait penyaluran Raskin adalah :

- Distribusi masih terkendala oleh Medan/kondisi geografis cukup berat, $\pm 22\%$ menggunakan angkutan perairan (laut/sungai) yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan pasang surut perairan. Disamping itu, akses ke Titik Distribusi (TD) terkendala oleh tingginya biaya transportasi, kesiapan di Titik Distribusi dan kurangnya dukungan dana pendamping (Subsidi Ongkos Angkut/SOA) dari kab/kota;
 - Keterlambatan penyaluran Raskin di Provinsi Kalimantan Timur, karena belum seluruh kabupaten/kota dapat menerbitkan SPA diawal tahun 2015, hal ini disebabkan adanya perubahan Jumlah RTS-PM Raskin tahun 2015 untuk 9 (sembilan) Kabupaten/Kota selain kota Balikpapan (sesuai surat Kemenko Kesra Republik Indonesia, Nomor:B-1754/DEPP.II/XI/2014 tanggal 25 November 2014 tentang Penjelasan Revisi Pagu Raskin Provinsi Kaltim tahun 2015), sehingga memerlukan waktu pelaksanaan terhambat oleh tahapan verifikasi untuk validasi DPM Raskin tahun 2015 dan sosialisasi kepada RTS-PM.
5. Permasalahan pelaksanaan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan adalah tidak adanya pemetaan terhadap generasi muda yang memiliki minat pada kewirausahaan, dan belum tersedianya data terpilah pelaku usaha perempuan pemula di Provinsi Kaltim.
 6. Permasalahan Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang sarana dan Prasarana Dasar Permukiman :
 - Ketidaksiapan data penerima bantuan Rumah Layak Huni yang disebabkan oleh ketidaksiapan data dari Dinas setempat yang mengakibatkan satu persatu data akhirnya harus diminta ke pihak Desa, Kelurahan dan

Kecamatan, dan pemerintah setempat tidak memiliki database program perumahan yang telah terealisasi.

- Calon penerima memiliki kondisi lahan tidak memenuhi syarat keamanan konstruksi dimana sering terdapat kondisi tanah lereng atau kondisi tanah rawa, serta terpencar-pencar dengan kondisi jalan yang sulit dijangkau.

7. Kegiatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana baru dapat dilaksanakan pada akhir triwulan III 2015 karena proses revisi anggaran kegiatan yang berjalan lambat..

b. Solusi

1. Perlu sosialisasi secara intensif tentang upaya peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan pembinaan kelembagaan Posyantek kepada Kabupaten/Kota.
2. Advokasi kepada Kabupaten/Kota untuk dapat mengintegrasikan 100% masyarakatnya ke BPJS.
3. Mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) baik di Provinsi maupun Kab/kota sehingga baik data maupun program percepatan penanggulangan kemiskinan benar-benar dilaksanakan secara terintegrasi.
4. Perbaiki sistem penyaluran Raskin dan penyediaan Dana Pendamping dalam bentuk Subsidi Ongkos Angkutan/Subsidi HTR untuk kelancaran penyaluran Raskin;
5. Peningkatan system pendataan dan validasi dalam penetapan data RTS-PM per Kabupaten/Kota.
6. Untuk peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, diperlukan tim terpadu lintas sektor dan tersedianya data terpilah pelaku usaha perempuan.

7. Untuk meningkatkan sarana dan Prasarana Dasar Permukiman bagi masyarakat miskin, design rumah batako atau rumah panggung disesuaikan dengan kondisi di lapangan, dan pemerintah setempat fokus pada satu wilayah, dengan sasaran yang tepat dan menyediakan lahan kosong atau membuat cluster baru di daerah yang telah disediakan.

2.2. Prioritas 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

2.2.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dilaksanakan melalui 8 program dan 25 kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp 29,923 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah tingkat pengangguran 7,50% melebihi dari target 7,00%.

Tabel 4.8.
Program Kegiatan Prioritas
terkait Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Prioritas 4 : Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah		DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM
	1.1	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	
2	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Kenggulan Kompetitif		
	2.1	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
	2.2	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	
3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		
	3.1	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pembangunan	

		Koperasi	
4	Program Pengembangan Kewirausahaan dan kenggulan Kompetitif (Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif)		
	5.1	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan	
5	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN, UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG, UPTD BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	5.1	Pembangunan Balai Latihan Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	5.2	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	5.3	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan Dan Instruktur BLK	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI; UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	5.4	Pengadaan Bahan Dan Materi Pendidikan Dan Ketrampilan Kerja	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	5.5	Pendidikan Dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI; UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN; UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG; UPTD BALAI PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS
	5.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Dan Prasarana BLK	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	5.7	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI; UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
6	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja		
	6.1	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	6.2	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	
	6.3	Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan Kewirausahaan	

	6.4	Pemberian Fasilitas Dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	
	6.5	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	
	6.6	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Padat Karya	
	6.7	Koordinasi Penyusunan Rencana Penempatan Tenaga Kerja Dan Informasi Pasar Kerja	
7	Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah		DINAS SOSIAL
	7.1	Pengembangan Kecakapan Hidup Bagi Putus Sekolah	
	7.2	Pengembangan Kecakapan Hidup Bagi Remaja Putus Sekolah	
8	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	8.1	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	
	8.2	Pelatihan Kecakapan Hidup	
	8.3	Monitoring Dan Konsultasi Program Pengembangan Kewirausahaan	
	8.4	Pelatihan Tot Kewirausahaan Pemuda	
	8.5	Ekspo/Pameran Pembangunan Kalimantan Timur	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja” pada Tahun 2015 rata-rata mencapai realisasi keuangan 83,71% dan realisasi fisik 88,93%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian peningkatan dan perluasan kesempatan kerja, adalah sebagai berikut :

1. Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah, melalui kegiatan Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah di dalam negeri sebanyak 5 kali; Pameran Produk Unggulan Koperasi dan UMKM di luar negeri 1 kali.

2. Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Kunggulan Kompetitif, melalui kegiatan ; bimtek untuk 200 pelaku UMKM; kemitraan 200 UMKM dengan Perusahaan pemberi CSR; MOU antara koperasi dan UMKM unggulan dengan pihak ke 3 antara lain PT. Pupuk Kaltim, Chevron, Smesco, Sarana Kaltim Ventura dan Bank/Jamkrida sebanyak 5 MOU; dan pelatihan kewirausahaan kepada 800 calon wirausahawan baru.
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, melalui kegiatan; Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi; Forum Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UMKM Daerah ; pengembangan Data UMKM se-Kaltim; Evaluasi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; penyusunan nilai tambah sektor koperasi dan UMKM; Pendampingan KUKM 10 koperasi unggulan dan 20 UKM unggulan dengan jumlah pendamping KUKM 36 orang; Diklat peningkatan SDM KUKM sebanyak 120 orang; Fasilitasi Penerbitan sertifikat 7.500 ijin IUMK dan sertifikat 20 Nomor Induk Koperasi; Fasilitasi penghargaan kabupaten/kota/tokoh/koperasi berprestasi; Fasilitasi penilaian 50 koperasi berkualitas.
4. Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif, melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan bagi 440 orang Pemula, dan Gelar Produk 100 Wirausaha Produktif.
5. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui kegiatan; Pembangunan balai latihan kerja di Kutai Barat 1 unit; Penyusunan data base tenaga kerja daerah yang sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja; Bimbingan teknis penyusunan kurikulum berbasis kompetensi 30 orang; Akreditasi 10 lembaga pelatihan kerja; Bimbingan teknis identifikasi kebutuhan pelatihan 30 orang; Pendidikan dan Ketrampilan Kerja sebanyak 35 Pelatihan; Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi berbasis kompetensi bagi 48 pencari kerja; Sosialisasi program

pemagangan luar negeri kepada 500 tenaga kerja; Pra Pelatihan Pemagangan Luar Negeri untuk 60 tenaga kerja.

6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, melalui kegiatan ; penyusunan informasi bursa tenaga kerja dan Data Pencari Kerja dalam website BKOL yang telah diakses oleh 25.772 pengunjung; pelatihan Bursa Kerja Khusus (BKK) kepada 120 orang pencari kerja; pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan kepada 140 Orang; pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat kepada 75 orang; monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Penempatan Tenaga Kerja Pasca JMF di Perusahaan; penyelenggaraan *Job Market Fair* (JMF) diikuti 67 perusahaan dari berbagai bidang usaha dengan total lowongan sebanyak 2.074 dengan jumlah lamaran yang masuk sebanyak 7.850 lamaran dan yang diterima sebagai karyawan sebanyak 345 orang; Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Padat Karya kepada 330 orang pengangguran; Penyusunan Rencana Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja terhadap penempatan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan.
7. Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah, melalui kegiatan pelatihan Kecakapan Hidup bagi 80 orang Remaja Putus Sekolah.
8. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, melalui kegiatan; pelatihan kewirausahaan bagi 80 orang pemuda; pelatihan kecakapan hidup bidang pertanian dan perikanan bagi 80 orang pemuda pesantren; pelatihan TOT Kewirausahaan kepada 40 orang pemuda.

2.2.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Secara umum pencapaian target program-program dan sasaran pengurangan angka pengangguran dapat tercapai, namun masih ditemukan permasalahan seperti :

1. Belum optimalnya monitoring dan pendampingan Wirausaha Baru pasca pelatihan oleh Disperindagkop kab/kota.
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi dari segi manajemen, permodalan, akses pasar dan pembiayaan.
3. Jumlah tenaga fungsional pengantar kerja belum sesuai kebutuhan sehingga evaluasi terhadap pencari kerja yang sudah ditempatkan belum maksimal.
4. Terbatasnya dukungan permodalan bagi wirausaha muda dalam rangka pengembangan usahanya.
5. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi standar kebutuhan pasar kerja.
6. Masih terjadi pemutusan hubungan kerja yang cukup besar disebabkan terjadinya penutupan beberapa perusahaan, akibatnya pengangguran bertambah.

b. Solusi

1. Pembentukan Pokja wirausaha baru yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinir dan memfasilitasi Program Wirausaha Baru lintas sektor (Pusat, Provinsi dan Kab/kota).
2. Pengembangan diklat tentang manajemen koperasi dan sertifikasi manager pengelola koperasi melalui diklat SKKNI dan dukungan kemitraan dengan pihak terkait.
3. Pengembangan jenis usaha baru yang menghasilkan produk unggulan dan dapat pasar.

4. Fasilitas kemudahan akses permodalan bagi wirausaha muda melalui KUR.

2.3 Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

2.3.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dilaksanakan melalui 2 program dan 3 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,27 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah paritas daya beli Rp 11,02 juta melebihi dari target Rp 724.450.

Tabel 4.9.
Program Kegiatan Prioritas terkait Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan		
No	Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
	1.1 Monitoring Dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan	
	1.2 Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJPD, RPJMD Dan RKPD	
2	Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD)	BIRO EKONOMI
	2.1 Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Pengembangan Ekonomi Kerakyatan” pada Tahun 2015 rata-rata mencapai realisasi keuangan 81,71% dan realisasi fisik mencapai 82,64%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian pengembangan ekonomi kerakyatan, adalah sebagai berikut :

1. Program pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah, melalui kegiatan; Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan di Daerah terhadap kegiatan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2015; dan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD; serta Gugus Kendali Kaltim Maju 2018.
2. Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui kegiatan koordinasi pengendalian inflasi daerah secara intensif oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam bentuk High Level Meeting, rapat regional dan sosialisasi pengendalian inflasi di Kabupaten/Kota.

2.3.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Secara umum pencapaian target program-program dan sasaran pemberdayaan ekonomi kerakyatan telah tercapai. Namun untuk dapat lebih mengoptimalkan program-program pemerintah dalam memberdayakan sektor riil kedepan masih ditemukan permasalahan seperti :

1. Penyerapan anggaran program kegiatan pemerintah baik melalui APBD maupun APBN, yang masih rendah dan berpengaruh terhadap
2. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang masih kurang baik antar kabupaten/kota sehingga menghambat kelancaran distribusi barang kebutuhan.
3. Kondisi beberapa pelabuhan di Kalimantan Timur yang masih belum optimal terkendala beberapa infrastruktur pendukung yang belum memadai terutama akses jalan menuju pelabuhan.

b. Solusi

1. Optimalisasi pengendalian penyerapan anggaran pelaksanaan pembangunan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.
2. Perbaikan infrastruktur utama yang mempengaruhi kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok.
3. Mendorong penyelesaian jalan tol Balsam sehingga 2019 sudah beroperasi, mengupayakan ke Pemerintah pusat agar pelabuhan kariangau menjadi pelabuhan ekspor-impor, jalur kereta penunjang/logistic.
4. Optimalisasi pemanfaatan Pusat Informasi Harga dan ketersediaan Pangan Strategis, agar terciptanya tata niaga yang dapat memotong rantai distribusi barang kebutuhan. (telah terbentuk PIHPS di Pemprov Kaltim, TPID Balikpapan, dan TPID Samarinda).
5. Kerjasama antar TPID, terutama dengan daerah pemasok (Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Bali dan nusra).
6. Mendorong Pembentukan TPID di Kabupten/Kota yang belum terbentuk.

2.4. Prioritas 6 : Percepatan Tranformasi Ekonomi

2.4.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi dilaksanakan melalui 3 program dan 13 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10,055 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah pertumbuhan ekonomi dengan migas -1,46% yang tidak mencapai target 3,2 – 3,7; pertumbuhan ekonomi dengan non migas -1,63% yang tidak mencapai target

7,0 – 7,3; dan pertumbuhan ekonomi dengan non migas dan non batubara 4,14% yang akan mencapai target 7,7 – 8,0.

Tabel 4.10.

Program Kegiatan Prioritas terkait Percepatan Transformasi Ekonomi

Prioritas 6 : Percepatan Tranformasi Ekonomi			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi		BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
	1.1	Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi	
	1.2	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal Di Daerah	
	1.3	Penyederhanaan Prosedur Perijinan Dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	
	1.4	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	
	1.5	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	
	1.6	Penyusunan Dan Perencanaan Pengembangan Investasi	
	1.7	Penguatan Kelembagaan Ptsp Kab/Kota	
2	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi		
	2.1	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	
	2.2	Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	
	2.3	Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal	
	2.4	Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	
	2.5	Penyelenggaraan Pameran Investasi	
3	Program Kemudahan Pelayanan Dan Percepatan Proses Perijinan		
	3.1	Implementasi SOP	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Percepatan Transformasi Ekonomi” pada Tahun 2015 rata-rata mencapai realisasi keuangan 89,89% dan realisasi fisik 96,95%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian percepatan transformasi ekonomi, adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, melalui kegiatan :
 - Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi melalui pelaksanaan kesepakatan kerjasama investasi antar daerah, provinsi dan internasional (MoU) sebanyak 5 MoU;
 - Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah dengan Aplikasi Sistem Informasi Penanaman Modal (SIMPEDAL) yang dikembangkan ; Standar Manajemen Mutu Internasional Bidang Pengendalian dan Pengawasan (ISO 9001:2008);
 - Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal melalui penerbitan perizinan dan non perizinan sebanyak 60 izin; Standar Manajemen Mutu (SMM) 9001:2008 Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 1 ISO;
 - Kajian kebijakan penanaman modal melalui Review Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM); Draft Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan melalui menyusun Data Perusahaan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 100 LKPM;
 - Penyusunan Perencanaan Pengembangan Investasi melalui penyusunan Dokumen Renstra BPPMD; Laporan

sinkronisasi program/kegiatan penanaman modal di Kaltim (Lintas Kab/Kota); Website BPPMD;

- Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota; Jumlah Forum komunikasi PTSP 3 kali; Jumlah Koordinasi dan pembinaan PTSP Kab/Kota 10 PTSP; penyelenggaraan rapat forum komunikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) se-Kaltim, Kab/Kota; Pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE); Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK).

2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, melalui kegiatan :

- Pengembangan potensi unggulan daerah melalui input unit data/informasi yang pada Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID);
- Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA melalui pelaksanaan kunjungan koordinasi pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA dengan Kab/Kota 30 kali;
- Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal melalui penyusunan Laporan hasil koordinasi dan konsultasi dibidang pengembangan penanaman modal;
- Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal melalui evaluasi laporan kegiatan penanaman modal sebanyak 100 perusahaan;
- Penyelenggaraan pameran investasi melalui penyelenggaraan pameran promosi investasi di dalam dan luar negeri 16 event.

3. Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan, melalui kegiatan Implementasi 3 SOP perizinan dan non perizinan.

2.4.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Belum optimalnya layanan yang diberikan karena masih terbatasnya tenaga PNS dan tim teknis.
2. Belum maksimalnya partisipasi swasta termasuk pemerintah Kabupaten/Kota dalam kerjasama BIMP–EAGA dan kerjasama antar daerah.
3. Belum terintegrasinya promosi investasi yang dilakukan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten/Kota.
4. Profil komoditi yang ditawarkan belum dilengkapi dengan informasi yang rinci sehingga calon investor tidak memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil sikap bisnisnya.
5. Permasalahan ketidakjelasan status kepemilikan lahan dan keterbatasan Infrastruktur pendukung menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di Kalimantan Timur.

b. Solusi

1. Perlu adanya penambahan tenaga PNS yang berkualifikasi berkenaan dengan perijinan dan mengoptimalkan tim teknis sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Perlu dilakukan Bussiness Forum dengan fokus pada suatu daerah dengan satu atau dua sektor.
3. Mengefektifkan kembali Surat Gubernur Kalimantan Timur tentang penunjukan BPPMD Provinsi sebagai koordinator promosi investasi penanaman modal.
4. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan SKPD terkait tentang peruntukan dan kepemilikan lahan.
5. Perlu adanya koordinasi lintas sektoral terkait sehingga adanya satu komitmen untuk membangun fasilitas pendukung investasi di Kaltim.

2.5 Prioritas 9 : Penguatan Cadangan Pangan/Peningkatan Produksi Pangan

2.5.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 9 : Penguatan Cadangan Pangan/Peningkatan Produksi Pangan dilaksanakan melalui 5 program dan 41 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77,949 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah bauran energi baru terbarukan 1,01% mencapai target 1,12%.

Tabel 4.11.
Program Kegiatan Prioritas terkait
Penguatan Cadangan Pangan/Peningkatan Produksi Pangan

Prioritas 9 : Penguatan Cadangan Pangan/Peningkatan Produksi Pangan		
No	Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
1.1	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
1.2	Penyuluhan Dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan	
1.3	Pengembangan SDM Penyuluh	
1.4	Pengembangan Sistem Informasi Penyuluhan	
1.5	Koordinasi Kebijakan Penyuluh	
1.6	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penyuluh	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
1.7	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	UPTB BALAI PELATIHAN PERTANIAN
2	Program Pengembangan Dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
2.1	Pengembangan Kelembagaan Penyuluh	

3	Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya		DINAS PEKERJAAN UMUM; UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH SELATAN; UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH TENGAH; UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH TIMUR; UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH UTARA
	3.1	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	DINAS PEKERJAAN UMUM
	3.2	Perencanaan pembangunan reservoir	
	3.3	Perencanaan normalisasi saluran sungai	DINAS PEKERJAAN UMUM
	3.4	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	
	3.5	Pembangunan Jaringan Tata Air Daerah Rawa	
	3.6	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten pasir	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH SELATAN
	3.7	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kota Samarinda	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH TENGAH
	3.8	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Kutai Kartanegara I	
	3.9	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Kutai Kartanegara II	
	3.10	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten Kutai Timur	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH TIMUR
	3.11	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air wilayah timur	
	3.12	Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Berau	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH UTARA
	3.13	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air wilayah utara	
4	Program Peningkatan Ketahanan Pangan		
	4.1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	
	4.2	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	
	4.3	Analisis Dan Penyusunan Pola Konsumsi Dan Suplai Pangan	

	4.4	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
	4.5	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	
	4.6	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kebijakan Perberasan	
	4.7	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	
	4.8	Pemantauan Dan Analisis Harga Pangan Pokok	
	4.9	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	
	4.10	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	
	4.11	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	
	4.12	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	
	4.13	Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	
	4.14	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	
	4.15	Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan	
	4.16	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	
	4.17	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	
5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN UPTB BALAI PELATIHAN PERTANIAN
	5.1	Penyuluhan Dan Pendampingan Petani Dan Pelaku Agribisnis	
	5.2	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	
	5.3	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Penguatan Cadangan Pangan/Peningkatan Produksi Pangan” pada Tahun 2015 rata-rata mencapai realisasi keuangan 89,75% dan realisasi fisik 94,27%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian penguatan cadangan pangan/peningkatan produksi pangan, adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan, melalui kegiatan :
 - Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan melalui Demplot/kaji terap (Kutai Barat, Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara) 3 lokasi ; Demplot Tanaman Jelay (Kutai Kartanegara) ; Demplot Kentang Udara (Samarinda);
 - Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan melalui penyusunan Juklak pembinaan penyuluh sebanyak 30 buku; Pengembangan SDM Penyuluh melalui penyusunan Buku Database penyuluh ; Buku database kelembagaan penyuluh; Buku sebaran penyuluh; Buku Database Penyuluh Bersertifikasi; Buku Program Penyuluhan Provinsi; Buku Statistik Penyuluhan; Pengembangan Sistem Informasi Penyuluhan dengan menyelenggarakan Stand Pameran sebanyak 5 stand; Koordinasi Kebijakan Penyuluh dengan menyusun Hasil Rumusan Komisi Penyuluhan Provinsi;
 - Peningkatan kapasitas 180 orang tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan;
2. Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh, melalui kegiatan pengembangan kelembagaan penyuluh dengan pemberian 25 laptop kepada Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Berprestasi; Penilaian kelembagaan dan ketenagaan penyuluh; pelaksanaan Revitalisasi kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, melalui kegiatan:
 - Perencanaan pembangunan jaringan irigasi untuk wilayah SID Rantau Pulung; Studi Optimalisasi Daerah Irigasi D.I

Labanan; Lanjutan Penyusunan Geodatabase Spasial; Lanjutan Inspeksi Program Kegiatan Bid. SDA Kaltim;

- Perencanaan pembangunan reservoir untuk wilayah SID Kandilo & Barrage S. Santan; UKL/UPL Retensi Teluk Bayur; UKL/UPL Bendali Muang; Review Amdal Marang Kayu; Studi Potensi Air Baku Biatan; UKL/UPL Sumur Dalam Kariangau; Studi Pengendalian Banjir Tumbit; Studi Potensi Embung DAS Dumarin; UKL/UPL Jaringan PIPA Sekerat dan Kaliorang; Studi LARAP Bendungan Marangkayu;
- Perencanaan normalisasi saluran sungai dengan menyusun Studi Konservasi Bendung Biatan ; SID Pengaman Pantai Talisayan dan Dumaring ; Studi Konservasi Bendung Sekerat; Master Plan pengendalian banjir kab. Paser; UKL/UPL Pengendalian Banjir Loa Buah; UKL/UPL Pengaman Pantai Senipah; Revisi Penyusunan Rancangan Pengeloaan SDA Wil. Sungai Kandilo; Revisi Penyusunan Rancangan Pengeloaan SDA Wil. Sungai Karang;
- Optimalisasi fungsi jaringan irigasi D.I Semurut 3.515 meter dan D.I Biatan 1.200 meter;
- Pembangunan Jaringan Tata Air Daerah Rawa berupa Bangunan Jaringan Tata Air Rawa Tabalar Muara Tanggul 1.238 meter, Saluran 5.200 meter, Jalan Inspeksi 570 meter;
- Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten pasir di D.I Sepaku 18.000 M; D.I Petung 20.000 m; D.I Petung 8.000 m; D.I Sebakung 20.000 m; D.I Babulu Darat 17.200 m; D.I Sebakung 8.000 m; D.I Waru 19.250 m;
- Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kota Samarinda dengan Pemeliharaan Saluran Pembawa 18.000 M, Pemeliharaan Saluran Pembuang 17.500 M, Pemeliharaan Saluran Pembuang Skunder 2.000 M, Pemeliharaan

Saluran Pembuang Primer 3.000 M, Box/Scat Dam 1 Buah, Pemeliharaan Bendung 1 Buah dan Talang 1 Buah;

- Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Kutai Kartanegara I dengan Pemeliharaan Saluran Pembawa 14.000 M, Pemeliharaan Saluran Pembuang 26.500 M, Pembuatan Scat Dam 2 Buah, Dinding Penahan Tanah/Bronjong 1 Buah, Operasional Pompa 2 Buah, Pemeliharaan Bendung 1 Buah dan Perbaikan Saluran/Gorong-Gorong 2 Buah;
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Kutai Kartanegara II dengan Pemeliharaan Saluran Pembawa 15.000 M, Pemeliharaan Saluran Pembuang 21.000 M, Pemeliharaan Bangunan Bagi/Sadap 31 Buah, Operasional Pompa Irigasi 5 Buah, Pemeliharaan Bendung 2 Buah, Pembuatan Pintu Bagi/Sadap (Pintu Air) 2 Buah dan Pemasangan Pipa Saluran Pembawa 150 m;
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten Kutai Timur dengan pemeliharaan jaringan irigasi pada 4 Daerah irigasi 5 Ha; pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air 3 daerah irigasi 4.300 Ha;
 - Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten Berau dengan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Pembersihan saluran primer dan sekunder 4 Daerah irigasi;
 - Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air wilayah utara dengan Pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air wilayah utara 2 daerah irigasi;
4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, melalui kegiatan:
- Penanganan daerah rawan pangan melalui Identifikasi dan Intervensi Rawan Pangan di 6 Kabupaten; Buku Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); Buku Analisis Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnearibility Atlas); penyusunan data base potensi produksi pangan dan ketahanan pangan; Analisis

pola konsumsi dan suplai pangan; Analisis rasio kebutuhan pangan; Petunjuk Pelaksanaan Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap kebutuhan pangan; Evaluasi Kebijakan Perberasan; Juklak Neraca Bahan Makanan/Skor Pola Pangan Harapan; Laporan Neraca Bahan Makanan/Skor Pola Pangan Harapan; Juknis Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan rumah tangga; bantuan Bibit Tanaman, pupuk, pestisida, polybag kepada 10 kelompok wanita tani; Pemantauan dan analisis harga pangan pokok dan perkiraan ketersediaan 2016;

- Pengembangan cadangan pangan daerah Provinsi Kaltim 115 ton; Pengembangan desa mandiri pangan; Pengembangan diversifikasi tanaman; pengembangan 19 lumbung pangan desa; pengembangan model distribusi pangan yang efisien dan Analisis Distribusi Pangan; pengembangan sistem informasi pasar komoditi pangan strategis;
 - Peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan penyusunan Juknis/laporan Apresiasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan; Juknis/laporan Sosialisasi Pangan Organik; Juknis/Laporan Pemantauan Mutu dan Keamanan Pangan; Juknis/Laporan Sosialisasi Sertifikat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), Pangan Segar Asal Hewan (PSAH), Nomor Kontrol Veteriner (NKV), Rumah Kemas; Sertifikat Prima; Dokumen Sistem Mutu (Doksistu);
 - Penyuluhan sumber pangan alternatif dengan melaksanakan Sosialisasi dan Penyusunan Buku Pangan Alternatif;
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, melalui kegiatan:
- Pelatihan petani dan pelaku agribisnis dengan Jumlah petani yang mengikuti Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) (90 orang); Laporan Workshop penyusunan rencana definitip kebutuhan kelompok (RDKK) di Kab.

Paser, Kab. Berau, Kab. PPU, Kab. Kukar dan Kab. Kutim (1 dokumen); Laporan Pelatihan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di 6 Kawasan Sentra Tanaman Pangan Kab. PPU, kab. Paser, Kab. Kukar, Kab. Kutim, Kab. Kubar dan Kab. Berau (1 dokumen); Petani Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura yang di latih penyusunan rencana definitip kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi (180 orang); Petani tanaman pangan yang di latih untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman (OPT) (150 orang);

- Peningkatan kemampuan lembaga petani dengan melaksanakan pelatihan teknologi bagi Penangkar sebanyak 10 orang; Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) berprestasi yang mendapatkan penghargaan (3 kelompok); Laporan hasil pertemuan Forum Petani (25 buku); Juklak Pertemuan Forum Petani (25 buku); Pertemuan Forum Petani (150 orang);
- Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis dengan penyusunan Buku Profil Balai Penyuluh Penyuluhan (BPP) (50 buku); Juklak dan Pedum penilaian Lomba Wana Lestari (25 buku); Hadiah Pemenang penilaian Lomba Wana Lestari (10 laptop); Hasil Laporan kegiatan forum koordinasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) (25 buku);

2.7.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Pengembangan jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian terkendala oleh proses pembebasan lahan.
2. Produksi beberapa komoditas pangan terutama tanaman hortikultura cabe rawit dan bawang masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

b. Solusi

1. Perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait kabupaten/kota dalam proses pembebasan lahan.
2. Mendorong pengembangan Budidaya Tanaman pangan hortikultura khususnya pengembangan Sentra produksi pertanian cabe rawit dan bawang untuk meningkatkan pasokan kebutuhan lokal.
3. Pengembangan Sawit-Sapi (perkebunan dan peternakan) untuk mencukupi kebutuhan daging lokal.

Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata

Misi ketiga Kaltim Maju 2018 adalah Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata, dengan tujuan Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas. Adapun sasaran pembangunan infrastruktur adalah meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar dengan indikator indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar dimana tahun 2015 ditargetkan sebesar 6,00 dengan kategori cukup.


Indeks kepuasan layanan infrastruktur ini merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Provinsi serta memberikan gambaran perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel baik pembangunan fisik maupun aspek manfaatnya.

Pemerintah Provinsi pada tahun 2015 melakukan survey Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) terhadap masyarakat di 10 Kabupaten/Kota dengan hasil sebesar 6,21 dengan kategori baik. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun 2014 dimana nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur hanya sebesar 5,90 dengan kategori cukup. Indeks ini terbentuk dari 6 variabel yang masing-masing dihubungkan dengan 5 jenis infrastruktur. Variabel tersebut yakni: ketersediaan fisik, kualitas

fisik, kesesuaian, pemanfaatan, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap perekonomian. Jenis infrastruktur yang dinilai meliputi jalan dan jembatan, transportasi, air bersih, irigasi, dan perumahan.

Tabel 4.12.

Capaian Sasaran Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	6.00	6,21	Tercapai (achieve)	

Sumber : Kajian Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. BAPPEDA Provinsi Kaltim Tahun 2015, RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, Evaluasi Tahun Kedua RPJMD Kalimantan Timur TA 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur

Secara umum dengan adanya penilaian indeks kepuasan layanan infrastruktur ini, telah menggambarkan bahwa masyarakat merasa terbantu dengan produk/output pembangunan infrastruktur saat ini karena sudah lebih baik dari sebelumnya walaupun ketersediaan serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Untuk itu pemerintah provinsi terus berupaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur agar hasilnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan Infrastruktur Dasar diupayakan melalui pencapaian Prioritas 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar.

3.1. Prioritas 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

3.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar dilaksanakan melalui 14

program dan 63 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,848 Trilyun.

Capaian prioritas ini adalah indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar 6,21% melebihi dari target 6,00%.

Tabel 4.13.
Program Kegiatan Prioritas
terkait Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Prioritas 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar		
No	Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.1	Perencanaan pembangunan jalan	
1.2	Perencanaan pembangunan jembatan	
1.3	Pengawasan pembangunan jalan dan jembatan	
1.4	Pembangunan Jalan Sebulu - Muara Bengkal	
1.5	Pembangunan Jalan Ring Road Tj Redeb - Teluk Bayur	
1.6	Pembangunan Jembatan Sangkulirang- Batu Iepok-Talisayan	
1.7	Peningkatan Jalan Samarinda - Anggana	
1.8	Peningkatan Jalan Sp. Samboja - Sp. Muara Jawa	
1.9	Peningkatan Jalan Sanga2 - Dondang	
1.10	Peningkatan Jalan Suryanata - Ptg Lembuswana	
1.11	Peningkatan Jalan Sp. Ambalut/Ptg. Lembuswana - Sebulu	
1.12	Pembangunan Jalan Km.38 - Semoi - Sepaku - Petung	
1.13	Peningkatan Jalan Km. 38 Balikpapan - Sp. Samboja	
1.14	Peningkatan Jalan 5.5 Balikpapan - Kariangau	
1.15	Peningkatan Jalan Sp. Blusuh - Damai	
1.16	Peningkatan Jalan Sangkulirang - Talisayan	
1.17	Pembangunan Jembatan Sei. Rantau Nibung	
1.18	Pembangunan Jembatan Interchange Martadinata - Slamet Riyadi	
1.19	Pembangunan jembatan ruas jalan Tj. Redeb - Talisayan	
1.20	Pembangunan Jalan Poros Batu Besaung - Berambai	
1.21	Pembangunan Jalan Patung Lembuswana - Sebulu - Muara Kaman	
1.22	Pembangunan Jembatan Long Bagun - Long Pahangai	

2	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		DINAS PEKERJAAN UMUM
	2.1	Pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah selatan	
3	Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan		
	3.1	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang	
	3.2	Pembangunan Jalan Samarinda Sanga-Sanga (TPK Palaran - Sanga2)	
	3.3	Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahakam 4 (Jembatan Kembar) Samarinda	
	3.4	Pembangunan Jalan Km 13 - Pelabuhan Kariangau	
	3.5	Pembangunan Jalan Outer Ring Road Jembatan Mahulu - Sp. M. Said	
	3.6	Pembangunan Jalan Dalam Kawasan Maloy	
	3.7	Pembangunan Jalan Outer Ring Road - Bandara Samarinda Baru (Batu cermin - Sei. Siring)	
	3.8	Peningkatan Jalan Harun Nafsi - Rifaddin	
	3.9	Pembebasan Lahan	
	3.10	Pembangunan Fender Jembatan P. Balang Bentang Pendek	
	3.11	Pembangunan Jembatan Kembar	
	3.12	Pembangunan Jembatan P. Balang Bentang Pendek (400M)	
4	Program pembangunan jalan tol		
	4.1	Pembangunan jalan tol balikpapan - samarinda	
5	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan		
	5.1	Pembangunan Jalan Sakaq Lotoq - Sp. Abit - Kahala Kota Bangun	
	5.2	Pembangunan Jalan Batu Cermin - L2 Tenggarong	
	5.3	Pembangunan Jalan Ma. Bengkal - Sp. Batu Ampar	
	5.4	Pembangunan Jalan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari	
	5.5	Pembangunan Jembatan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari	
	5.6	Pembangunan Jembatan Tering	
6	Program Penyediaan dan pengelolaan air baku		
	6.1	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	
	6.2	Pembangunan sumur-sumur air tanah	
	6.3	Peningkatan distribusi penyediaan air baku	
7	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.		
	7.1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	

	7.2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	DINAS PEKERJAAN UMUM
	7.3	Pengembangan sistem distribusi air minum	
8	Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air		
	8.1	Pembangunan reservoir	
9	Program pengendalian banjir		
	9.1	Pembangunan reservoir pengendali banjir	
	9.2	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	
	9.3	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	
	9.4	Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	
	9.5	Pembangunan prasarana pengaman pantai	
10	Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP		DINAS PERHUBUNGAN
	10.1	Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru	
	10.2	Pembangunan Bandar Udara Maratua	
	10.3	Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kutai Timur	
	10.4	Pembangunan dermaga sungai samarinda seberang	
11	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyeberangan		
	11.1	Pembangunan Dermaga Sungai Long Bagun	
	11.2	Pembangunan dermaga sungai di kecamatan tabang	
12	Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara		DINAS PERHUBUNGAN
	12.1	Pembangunan Bandar Udara Datar Dawai	
	12.2	Penerbangan subsidi angkutan udara perintis	
13	Program sarana dan prasarana telekomunikasi		DISKOMINFO
	13.1	Pembangunan Tower di 7 Kabupaten	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar” pada Tahun 2015 rata-rata mencapai realisasi keuangan 86,24% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 89,43%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar, adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, melalui kegiatan :

- Perencanaan pembangunan jalan meliputi; Review Desain Perencanaan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan samarinda ruas Samboja-Palaran I, Samboja-Palaran II, dan Palaran-Jembatan Mahkota; Amdal Peningkatan Jalan Km. 38 Semoi Sepaku Petung; Amdal Peningkatan Jalan Samarinda Sebulu; Amdal Peningkatan Jalan Sanga Sanga Samboja Batas Balikpapan; Amdal Pembangunan Jalan Resak Petung; Amdal Pembangunan Jalan Outer Ring Road Samarinda; perencanaan pembangunan Jalan Non Status di Provinsi Kalimantan Timur; Pembuatan Leger Jalan Provinsi ruas Suryanata-Ptg. Lembuswana-Sebulu); Perencanaan Perbaikan Geometrik (Tanjakan) pada ruas jalan MT. Haryono dan Letjen Soeprapto Samarinda.
- Perencanaan pembangunan jembatan meliputi; Perencanaan Teknis Jembatan Ruas Jalan Ring Road Bandara Samarinda Baru 1, Jembatan Ruas Jalan Ring Road Bandara Samarinda Baru 2, Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek 2, Jembatan di Ruas Jalan Akses Pulau Balang 1, Perencanaan Teknis Jembatan di Ruas Jalan Akses Pulau Balang 2; UKL/UPL Interchange Martadinata, Jembatan Ruas Jalan Ring Road Bandara Samarinda Baru.
- Pengawasan pembangunan jalan dan jembatan meliputi; Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Sebulu-Muara Bengkal, Ma. Bengkal-Sp. Batu Ampar, Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, Jalan Km. 38 Semoi-Sepaku-Petung, Jalan Ring Road Tj. Redeb Teluk Bayur, Jembatan Sangkulirang-Batu Lepok-Talisayan, Jalan Samarinda-Anggana, Jembatan Sei. Rantau Nibung, Jembatan Interchage Martadinata Slamet Riyadi, Jembatan Ruas

Jalan Tj. Redeb-Talisayan, Jalan Poros Batu Besaung-Berambai, Jalan di Kota Samarinda, Jalan Akses Jembatan Pulau Balang, Jalan Samarinda-TPK Palaran-Sanga Sanga, Jalan Pendekat Jembatan mahakam 4 (Jembatan Kembar) Samarinda, Jalan outer Ring Road Jembatan Mahulu-Sp. M.Said, Jalan Dalam Kawasan Maloy, Jalan Outer Ring Road Bandara Samarinda Baru, Jembatan Fender Jembatan P. Balang Bentang Pendek 400 meter, Manajemen Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Sakaq Lotoq-Sp. Abit-Kahala Kota Bangun, Jalan Batu Cermin L2 Tenggarong, Jalan dan jembatan Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari, Jembatan Tering, Saluran Drainase/Gorong Gorong, Jalan dan Jembatan Tersebar se Kaltim ; Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Samboja-Sp. Muara Jawa, Jalan Sanga2 Dondang, Jalan Suryanata Ptg. Lembuswana, Jalan Sp. Ambalut-Patung Lembuswana-Sebulu, Jalan Km. 38 Balikpapan Sp. Samboja, Jalan Km 5,5 Balikpapan Kariangau, Jalan Sp. Blusuh Damai, Jalan Sangkulirang Talisayan, Pemeliharaan Jembatan Tersebar se Kaltim, Jalan Harun Nafsi-Rifaddin.

- Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan konstruksi Rigid Pavement meliputi; Ruas Sebulu - Muara Bengkal sepanjang 1 Km, Jalan Ring Road Tj Redeb - Teluk Bayur sepanjang 1 Km, Jalan Samarinda–Anggana sepanjang 1 Km, Jalan Sp. Samboja - Sp. Muara Jawa sepanjang 3 Km, Jalan Sanga Sanga – Dondang sepanjang 2 Km, Jalan Suryanata - Ptg Lembuswana sepanjang 4 Km, Jalan Sp. Ambalut/Ptg. Lembuswana – Sebulu sepanjang 3,5 Km, Jalan Km.38 - Semoi - Sepaku – Petung sepanjang 1,5 Km, Ruas jalan Sepaku - Petung sepanjang 1,5 Km, Jalan 5.5 Balikpapan – Kariangau sepanjang 485 meter, Jalan Sp. Blusuh – Damai sepanjang 1,6 Km, Jalan Poros Batu

Besaung – Berambai sepanjang 1,4 Km, Jalan Patung Lembuswana - Sebulu - Muara Kaman sepanjang 3 km.

- Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan konstruksi Aspal meliputi; Jalan Km. 38 Balikpapan - Sp. Samboja sepanjang 3 Km, Jalan Sp. Blusuh – Damai sepanjang 1 Km, Jalan Sangkulirang – Talisayan sepanjang 3 Km.
 - Pembangunan Jembatan meliputi; Jalan Sangkulirang-Batu lepok-Talisayan sepanjang 25 Meter, pemancangan Jembatan Sei. Rantau Nibung, Jembatan Interchange Martadinata - Slamet Riyadi sepanjang 330 m, Jembatan Ruas Jalan Tj. Redeb – Talisayan sepanjang 60 Meter, Jembatan Long Bagun - Long Pahangai.
2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, melalui kegiatan pemeliharaan jalan meliputi; jalan dalam Kota Samarinda sepanjang 22 km, jalan dan jembatan wilayah selatan sepanjang 150 Km, jalan dan jembatan wilayah tengah (Kota Samarinda, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat), jalan dan jembatan wilayah timur sepanjang 215 Km, jalan dan jembatan wilayah utara sepanjang 200 Km.
 3. Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan, melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan meliputi; Jalan Akses Jembatan Pulau Balang sepanjang 1 Km sisi penajam dan pekerjaan tanah sepanjang 1,7 sisi Balikpapan, Jalan Samarinda Sanga-Sanga (TPK Palaran– Sanga Sanga) sepanjang 1,5 Km, pembukaan Jalan Outer Ring Road Jembatan Mahulu - Sp. M. Said sepanjang 7 Km, Jalan Dalam Kawasan Maloy sepanjang 2 Km dan pematangan Tanah sepanjang 1,5 Km, Jalan Outer Ring Road - Bandara Samarinda Baru (Batu cermin - Sei. Siring) sepanjang 650 meter, Jalan Harun Nafsi – Rifaddin sepanjang 1,2 Km, pembebasan Lahan untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan (Samarinda, Kukar, Balikpapan, dan PPU), Fender Jembatan P. Balang Bentang Pendek sebanyak 10 Titik, Pengadaan

Tiang Pancang dan Pemancangan sebanyak 4 Pilar Jembatan Kembar Mahakam Samarinda, Jembatan Pulau Balang (lanjutan).

4. Program pembangunan jalan tol, melalui kegiatan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda terdiri dari 5 Segmen yaitu : Segmen 1 sepanjang 25,07 Km, Segmen 2 sepanjang 23,26 Km, Segmen 3 sepanjang 21,90 Km, Segmen 4 sepanjang 16,90 Km, Segmen 5 sepanjang 11,12 Km.
5. Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan, melalui kegiatan pembangunan jalan Sakaq Lotoq - Sp. Abit - Kahala Kota Bangun sepanjang 1 Km, Jalan Batu Cermin - L2 Tenggarong sepanjang 0,5 Km, Jalan Ma. Bengkal - Sp. Batu Ampar dengan permukaan Agregat C sepanjang 5 Km, Jalan Long Bagun - Long Pahangai - Long Apari sepanjang 7 Km, Jembatan Long Bagun-Long Pahangai– Long Apari berupa pengadaan rangka jembatan, Perkuatan Bangunan Bawah Jembatan Tering sepanjang 300 Meter.
6. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku, melalui kegiatan; Pembangunan Spillway atau bangunan Pelimpah dan Jembatan pada Bendungan Wain; Perkuatan Tebing Bendung Sitiu Kabupaten Paser sepanjang 135 meter; Perkuatan Tebing Bendung Lombok Kabupaten Paser 175 meter; Pembangunan sumur-sumur air tanah Sistem Telemetry di Kawasan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau sebanyak 2 Unit; pembangunan POS Hidrologi sebanyak 6 Unit.
7. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, melalui kegiatan :
 - Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan Pengadaan/pemasangan pipa air minum/air bersih diameter 150-75 mm sepanjang 1.000 Meter; Supervisi Pengadaan/pemasangan pipa air minum/air bersih dia. 150 - 75 mm; Studi Evaluasi Kinerja SPAM Kota Samarinda.

- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sangatta sebanyak 1 Unit; Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Balikpapan sebanyak 1 Unit; Supervisi Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Sangatta; Supervisi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Balikpapan; Review Design IPLT Kota Bontang; Studi Evaluasi Kinerja IPAL Margasari Balikpapan; Detail Engineering Design (DED) Instalasi Pengolahan Air Limbah Kawasan Kota Tenggarong; Menyusun Database Sanitasi Kota Samarinda; Penanganan Kampung Rawan Sanitasi Kota Samarinda (Sidodadi dan Batu Cermin) sebanyak 2 Kawasan; Supervisi Penanganan Kampung Rawan Sanitasi Kota Samarinda.
 - Pengembangan sistem distribusi air minum dengan pembangunan Unit Produksi/Distribusi (2x200 l/d) Lokasi Kawasan Industri Maloy Kutim (Bangunan Penunjang) sebanyak 4 Unit; pengadaan Jaringan Distribusi Pipa Manggar Balikpapan sebanyak 1 Unit; Supervisi Prasarana dan Sarana Air Minum Kabupaten Kutai Timur; Supervisi Prasarana dan Sarana Air Minum Kota Balikpapan; menyusun Detail Engineering Design Sistem Penyediaan Air Minum (DED SPAM) Bandara Samarinda Baru.
8. Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air, melalui kegiatan pembangunan reservoir air baku rantau pulung di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 1 unit
 9. Program pengendalian banjir, melalui kegiatan : Pembangunan reservoir pengendali banjir berupa Pembangunan Pengendali Banjir Sistem Karang Asam Kecil sepanjang 719 Meter; Pengendali Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak Dalam sepanjang 96 meter; Pengendali Banjir Sungai Buluh sepanjang 100 meter; Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Sistem Karang Asam Besar dan

Loa Bakung sepanjang 660 meter dan Normalisasi Sungai 1.500 m'; kanalisasi Kelurahan Gunung Elai Kota Bontang sepanjang 279 meter; Peningkatan Drainase Pasang Surut Handil 5 sepanjang 3.820 meter, Jembatan Penghubung 5 Unit dan Pintu Klep 18 Unit; kanalisasi Sungai Guntung Kota Bontang sepanjang 233 meter; Pembangunan Pengendali Banjir Sistem Karang Mumus sepanjang 751 meter; Peningkatan Saluran Drainase Jl. Ilham Maulana Sangata sepanjang 675 meter; Pembangunan prasarana pengaman pantai Pantai Pejala sepanjang 307 Meter, Pantai Tanjung Tengah sepanjang 318 Meter, Pantai Manggar sepanjang 50 Meter, Pantai Beras Basah sepanjang 150 Meter.

10. Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP, melalui kegiatan:

- Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru berupa perbaikan tanah Runway sepanjang 2.250 meter dan pemeliharaan fasilitas sisi darat (Gedung dan Bangunan Operasional) sebanyak 49 Unit.
- Pembangunan landas pacu (runway) Bandar Udara Maratua di Kabupaten Berau panjang 1.300 meter x lebar 35 meter.
- Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kabupaten Kutai Timur berupa lanjutan pembangunan jalan lingkungan/pendekat dengan trestle (causeway) sepanjang 200 m dan penyusunan studi review study sisi laut Maloy berupa penyusunan bathimetry, didro-oceanografi dan rencana alur pelayaran.
- Pembangunan dermaga sungai Samarinda Seberang (lanjutan) dengan konstruksi dermaga apung dan bangunan penunjangnya sebanyak 1 unit dan secara operasional telah diserahkan terimakan ke Pemerintah Kota Samarinda.

11. Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyeberangan, melalui kegiatan

penyusunan Detail Engineering Design (DED) dermaga di Long Bagun Kab. Mahakam Hulu, dan Detail Engineering Design (DED) dermaga di Tabang Kab. Kutai Kertanegara.

12. Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara, melalui kegiatan ; pembangunan Bandar Udara Datah Dawai di Kabupaten Mahulu berupa penambahan lebar landasan Bandar Udara Datah Dawai (3,5 Meter x 750 Meter) seluas 2,625.00 m² ; penyusunan Study Penetapan Lokasi Bandar Udara Long Apari; Dokumen Lingkungan Hidup (DELH) Bandar Udara Datah Dawai; dan penyediaan Subsidi ongkos angkut penerbangan perintis sebanyak 3 Rute yaitu Samarinda-Datah Dawai; Samarinda-Melak dan Samarinda-Miau Baru.
13. Program sarana dan prasarana telekomunikasi, melalui kegiatan membangun 1 menara telekomunikasi yaitu di Kabupaten Berau (Desa Merasa Kec. Kelay).

3.1.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi masih menghadapi permasalahan:
 - Belum optimalnya penyelenggaraan jalan meliputi: pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan terkait dengan muatan sumbu terberat (MST) yang tidak sebanding daya mampu jalan;
 - Belum optimalnya konektivitas “jaringan transportasi” di pusat-pusat pelayanan wilayah (intra-regional) dan jaringan penghubung antar pusat pelayanan (inter-regional);
 - Kualitas dan kuantitas infrastruktur masih rendah;
 - Penyelesaian masalah sosial dalam pembebasan lahan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur berjalan

lambat karena kurangnya koordinasi dengan instansi terkait;

- Daya dukung dan kapasitas jalan dan prasarana transportasi lainnya untuk mobilisasi dan distribusi barang dan jasa yang tersedia belum sesuai kebutuhan;
 - Belum optimalnya peran provinsi dan kabupaten/kota karena kewenangan Bandara pengumpan dan pengumpul masih menjadi kewenangan mutlak Pemerintah Pusat. Di samping itu, Pembentukan Otoritas Bandara kenyataannya melemahkan peran dan fungsi Bidang Perhubungan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahakam 4 (Jembatan Kembar) Samarinda (1,6 Km Fly Over) menghadapi kendala keterlambatan pelaksanaan karena menunggu persetujuan MYC dari DPRD Prov. Kaltim, dan menunggu penyelesaian pembebasan lahan untuk jalan pendekatnya.
 3. Target Penanganan Banjir Kota Samarinda tahun 2015 belum tercapai karena pelaksanaan pembangunan terkendala oleh belum tuntasnya proses penyelesaian pembebasan lahan.
 4. Adanya standar parameter MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang berbeda-beda antara Kementerian PU, BPS dan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
 5. Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Maloy masih menghadapi kendala persetujuan AMDAL yang belum terbit dari Kementerian Lingkungan Hidup.
 6. Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru yang berlokasi di Sei. Siring Kota Samarinda masih terkendala masalah lahan masyarakat yang belum selesai proses pembebasannya.

7. Jalan akses yang menghubungkan Samarinda Kota dengan Bandara Samarinda Baru melalui Sempaja Samarinda, status lahan masih dalam proses penyelesaian (belum clear).
8. Jalan akses yang menghubungkan Samarinda dengan Bandara Samarinda Baru melalui Jln. Panjaitan, dan Sp. 3 Terminal Lempake rawan macet dan banjir.
9. Pembangunan menara telekomunikasi yang telah selesai dibangun dalam satu Tahun Anggaran belum langsung bisa dimanfaatkan / ON AIR.
10. Penentuan lokasi pembangunan menara sering pindah-pindah sehingga menghambat proses pengerjaan. Lokasi pembangunan menara yang sulit (akses darat) sehingga mempengaruhi pengiriman material, Gangguan Cuaca.
11. Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana untuk sektor perhubungan udara provinsi tidak memiliki kewenangan lagi.
12. Permasalahan program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP pada Dinas Perhubungan :
 - Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru yang berlokasi di Sei Siring Kota Samarinda masih terkendala masalah lahan masyarakat yang belum selesai proses pembebasannya
 - Jalan akses yang menghubungkan Samarinda Kota dengan Bandara Samarinda Baru melalui Sempaja Samarinda, status lahan masih dalam proses penyelesaian (belum clear)
 - Jalan akses yang menghubungkan Samarinda dengan Bandara Samarinda Baru melalui Jln. Panjaitan, dan Sp. 3 Terminal Lempake rawan macet dan banjir.

- Status Bandara Maratua Kabupaten Berau, Bandara Samarinda Baru dan Bandara di Perbatasan yaitu Bandara Long Apari (KSN) belum jelas, hal ini menjadi kendala dalam alokasi penganggaran apakah Belanja Modal dan atau Belanja Barang/Jasa.
- Percepatan penyelesaian dokumen Amdal Pembangunan Pelabuhan CPO dan Cargo Maloy Kab. Kutai Timur

b. Solusi

1. Perlunya penanganan lokasi yang prioritas.
2. Pengalokasian anggaran secara khusus untuk memenuhi target pemenuhan infrastruktur agar tercapai kondisi jalan mantap.
3. Peningkatan peran serta dan komitmen dari pemerintah kabupaten/kota untuk membantu penyelesaian masalah pembebasan lahan.
4. Perlu adanya kesepahaman mengenai parameter MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
5. Meningkatkan kerjasama dengan TNI dalam pembangunan infrastruktur pada lokasi yang memiliki kondisi geografis sulit dijangkau, di daerah perbatasan dan pedalaman melalui swakelola.
6. Peningkatan kualitas perencanaan infrastruktur dan meningkatkan sistem pengawasan pemanfaatan infrastruktur.
7. Peningkatan survei investigasi terkait pengawasan lalu lintas, pengawasan jalan, pengawasan pembangunan infrastruktur dan perencanaan pembangunan infrastruktur.
8. Peningkatan daya mampu jalan diatas 10 ton dan kapasitas pelayanan bandara dan pelabuhan untuk mobilisasi dan distribusi barang dan jasa.

9. Mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui kerjasama dengan pihak swasta dan CSR.
10. Mengusulkan kepada pemerintah pusat agar merevisi UU 23 Tahun 2014 tentang kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan meninjau kembali kewenangan otoritas bandara dengan melibatkan fungsi Dinas Perhubungan Daerah.
11. Percepatan pembebasan lahan oleh panitia pembebasan tanah (P2T) di Kabupaten/Kota untuk pembangunan infrastruktur.
12. Penyelesaian kepemilikan lahan (9 rumah) didepan jalan masuk Bandara Samarinda Baru harus segera diselesaikan, hal ini terkait dengan rencana pengoperasian Bandara.
13. Pihak Pekerjaan Umum (PU) harus menyelesaikan pembangunan jalan akses sempaja Bandara Samarinda Baru sebagai jalan alternatif.
14. Diperlukan manajemen rekayasa lalu lintas terkait penanganan jalan akses D.I Panjaitan, Sp 3 Terminal Lempake menuju ke BSB.
15. Perlunya koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan PT. Telkomsel terkait penentuan lokasi program pembangunan menara untuk tahun berikutnya, agar Genset/Power dan penyiapan BTS dapat dianggarkan juga dalam tahun yang sama. Disamping itu perlu dilakukan survey tentang blankspot telekomunikasi sehingga mempunyai data-data Desa yang belum terlayani telekomunikasi.
16. Koordinasi secara intensif dan mengupdate persyaratan-persyaratan terkait dengan penyelesaian penyelesaian Surat Izin Lingkungan dari KLH untuk Pelabuhan CPO dan Cargo Maloy Kutai Timur.

17. Penyelesaian Permasalahan program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP:

- Percepatan penyelesaian kepemilikan lahan (9 rumah) didepan jalan masuk BSB.
- Pihak Pekerjaan Umum (PU) harus menyelesaikan pembangunan jalan akses sempaja Bandara Samarinda Baru sebagai jalan alternatif.
- Harus ada manajemen rekayasa lalu lintas terkait penanganan jalan akses Panjaitan, Sp 3 Terminal Lempake menuju ke Bandara Samarinda Baru.
- Status rencana pengelola Bandara Long Apari, Bandara Samarinda Baru dan Bandara Maratua Kabupaten Berau harus diperjelas, hal ini untuk menghindari kesalahan dalam penentuan nomenklatur Belanja (apakah Belanja Modal atau Barang/Jasa).

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik

Misi keempat Kalimantan Timur Maju 2018 adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik, yang dijabarkan dalam 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran. Satu tujuan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan tiga sasaran yaitu (1) Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN, (2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, (3) Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja.

Capaian sasaran pembangunan di misi keempat sebagian besar menunjukkan hasil yang menggembirakan, kecuali opini BPK yang mengalami penurunan dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2014 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2015.

Sementara Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 5,58 melampaui target 5,7.

Selanjutnya juga terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik ditandai dengan meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 75 menjadi 76,65 dengan kategori baik.

Akuntabilitas kinerja Provinsi mendapatkan nilai B+ kategori tinggi (berdasarkan evaluasi Kementerian PAN dan RB RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)). Pemerintah Provinsi bertekad akan tetap meningkatkan kinerja melalui peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja.

Tabel 4.14.
Capaian Sasaran Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1.	Indeks Persepsi Korupsi	5,7	5,58**	Tercapai (On Track)	
2.	Opini BPK	WTP	WTP**	Tercapai (On Track)	
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	75 (baik)	76,65** (baik)	Tercapai (achieve)	
4.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	74,00 (B+)	75,14 (BB)	Tercapai (On Track)	
5.	Kinerja Pemerintahan Daerah	Tinggi	Tinggi**	Tercapai (achieve)	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur *) data tahun 2014, **) data SKPD

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik diupayakan melalui pencapaian Prioritas 11 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

4.1. Prioritas 11 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

4.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 11 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dilaksanakan melalui 13 program dan 53 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 59,915 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah indeks persepsi korupsi 5,58% melebihi dari target 5,7%; opini BPK dengan WTP yang mencapai target WTP; indeks kepuasan masyarakat 76,65% melebihi dari target 75%; akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah 75,14% melebihi dari target 74,00%; dan kinerja pemerintahan daerah yang mencapai target dengan kinerja yang tinggi.

Tabel 4.15.
Program Kegiatan Prioritas terkait Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas 11 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Pengembangan Zona Integritas		INSPEKTORAT
	1.1	Penerapan zona integritas pada SKPD	
2	Program pencegahan dan pemberantasan KKN		
	2.1	Penanganan pengaduan masyarakat	
	2.2	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/khusus	
	2.3	Fasilitasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN	
3	Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah		
	3.1	Evaluasi LPPD Kab/Kota	
4	Program penguatan kelembagaan PTSP		BIRO ORGANISASI
	4.1	Penguatan kelembagaan PTSP Provinsi dan Kab/Kota se-Kaltim	

5	Program Peningkatan Pelayanan Publik		
	5.1	Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	
	5.2	reformasi pelayanan sektor publik	
6	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja		
	6.1	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	
	6.2	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	
7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		BIRO KEUANGAN
	7.1	Penyusunan analisa standar belanja	BIRO KEUANGAN
	7.2	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	
	7.3	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	
	7.4	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	
	7.5	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	
	7.6	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	
	7.7	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	
	7.8	Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	
	7.9	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	
	7.10	Rekonsiliasi Keuangan Daerah	
	7.11	Rapat Kerja Teknis Tentang Keuangan Daerah	
	7.12	Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal	
	7.13	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	
	7.14	Pengelolaan, Pengadministrasian Usulan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	
	7.15	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD	

	7.16	Administrasi Ketatausahaan Biro	
	7.17	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	
8	Program pembinaan dan pengembangan aparatur		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	8.1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	
	8.2	Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai	
	8.3	Penempatan PNS	
	8.4	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	
	8.5	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	
	8.6	Pemberian penghargaan bagi PNS	
	8.7	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	8.8	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	
	8.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
	9.10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	
	9.11	Penyelenggaraan Sosialisasi Pelaksanaan Konseling	
	9.12	Ujian Dinas	
	9.13	Rapat Kerja Kepegawaian	
	9.14	Pengujian Kesehatan PNS	
	9.15	Evaluasi Kinerja PNS	
	9.16	Pemberhentian PNS	
10	Program Integrasi Aplikasi		DISKOMINFO
	10.1	Pembinaan dan pengembangan komunikasi dan informasi	
11	Program pendidikan politik masyarakat		KESBANGPOL

	11.1	Penyuluhan kepada masyarakat	
	11.2	Penyusunan data base partai politik, Orpol, Ormas, LSM dan Lembaga Adat	
	11.3	Pemantauan perkembangan politik di daerah	KESBANGPOL
	11.4	Verifikasi Berkas Bantuan Ormas, LSM, OKP dan Organisasi Lainnya	
	11.5	Penyusunan IDI	
12	Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah		BIRO PEMERINTAHAN
	12.1	Tidak Ada	
13	Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial		BAPPEDA
	13.1	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	
	13.2	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	
	13.3	Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map	
	13.4	Penyebarluasan capaian pembangunan daerah	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan” pada tahun 2015 rata-rata mencapai realisasi keuangan 83,75% dan rata-rata realisasi fisik 84,17%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Zona Integritas, melalui kegiatan penerapan zona integritas pada SKPD melalui SK Gubernur tentang Penetapan SKPD sebagai Zone Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda.

2. Program pencegahan dan pemberantasan KKN, melalui kegiatan; Penanganan pengaduan masyarakat; pemeriksaan dengan tujuan tertentu/khusus; Fasilitasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN dengan menyusun Laporan Aksi-Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).
3. Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah, melalui kegiatan Evaluasi atas Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD) 9 Kabupaten/Kota.
4. Program Peningkatan Pelayanan Publik, melalui kegiatan ; penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat se Kalimantan Timur; penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Perda Pelayanan Publik; Bimtek Penyusunan Juknis Pembiayaan Penerapan SPM sebanyak 9 Bidang pengampu SPM; Bimtek Penyusunan Target Capaian Penerapan SPM kepada 165 Orang; Fasilitasi/Evaluasi Penerapan SPM.
5. Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja, melalui kegiatan; Bimtek Pengembangan SAKIP kepada 126 Orang dari seluruh SKPD; penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan menyusun laporan Indikator Kinerja Utama; Penetapan Kinerja Provinsi Kaltim Tahun 2015; Fasilitasi Evaluasi SAKIP; Melakukan Asistensi Penyusunan Indikator Kinerja Utama dengan membentuk Tim Asistensi dari Kementerian PAN dan RB, Bappeda, Inspektorat serta Biro Organisasi; dan Penerapan Sistem AKIP.
6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, melalui kegiatan; Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tentang Analisis Standar Belanja dan digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan; penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD baik APBD Murni dan Perubahannya; penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD dengan menyusun Peraturan Gubernur tentang naskah

APBD dan P-APBD; penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah dilakukan Audit oleh BPK Perwakilan Kalitim; penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, beserta Laporan realisasi anggaran setiap semester yang disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian keuangan Republik Indonesia; Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, terutama mengenai pedoman penyusunan APBD dan peraturan terbaru, yakni mengenai Akuntansi Berbasis Akrua; Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah untuk para pengelola keuangan (Pejabat Pengelola Keuangan, Bendaharawan, operator simda) untuk memahami akuntansi berbasis akrual; Implementasi pembaharuan aplikasi SIMDA Keuangan; bimbingan dan workshop kepada SKPD di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur; Rekonsiliasi Keuangan Daerah dengan SKPD teknis dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi; Rapat Kerja Teknis Tentang Keuangan Daerah menghadapi Laporan Keuangan berbasis Akrua; Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Penyertaan Modal; Pembuatan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada tiap tiap SKPD sebanyak 325 Keputusan; pembinaan Aparatur Pengelola Keuangan Daerah pada 54 SKPD; peningkatan kapasitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah.

7. Program pembinaan dan pengembangan aparatur, melalui kegiatan ; Penyusunan rencana pembinaan karir PNS kepada 1,143 pegawai/aparatur dan 319 pejabat fungsional; koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan pihak terkait dalam perencanaan kebutuhan ASN Tahun berikutnya; penempatan 310 PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi; memberikan penghargaan kenaikan pangkat tepat waktu pada 1.511 orang

PNS; Pembangunan/pengembangan sistem informasi Database kepegawaian daerah; pengembangan 6 Aplikasi kepegawaian antara lain : Simpeg, Sistem Absensi Online, si Surat, Si Tamu, Elogbook dan Ecuti; Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 300 PNS; penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS terkait masalah hukum; pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas kepada 206 PNS Pemprov; Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan 122 Praja IPDN, seleksi 113 Calon Praja IPDN; Jasa Pelayanan Konseling kepada 149 PNS yang akan Purna Tugas; Ujian Dinas 59 orang PNS; Rapat Kerja Kepegawaian; pengujian Kesehatan 154 oran PNS; Evaluasi Kinerja PNS.

8. Program Integrasi Aplikasi, melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan komunikasi dan informasi untuk pengelolaan system pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta dalam mewujudkan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi terpadu yang terintegrasi meliputi 6 aplikasi yang terintegrasi yaitu Simda Keuangan, Teppa, Simpeg, Simonep, SIPPD dan Simda-BMD.
9. Program pendidikan politik masyarakat, melalui kegiatan; penyuluhan kepada Masyarakat (Tomas, Toga, Pemuda, Etnis, Ormas dan LSM); pendidikan politik bagi anggota Partai Politik Perempuan; Penyusunan data base partai politik, Orpol, Ormas, LSM dan Lembaga Adat; penyusunan Buku inventarisasi data base Ormas, LSM, dan Lembaga Adat se Kalimantan Timur; Bimtek Database dan Sosialisasi Perundang-Undangan; pemantauan perkembangan politik di daerah dengan menyusun laporan kegiatan; penyusunan dan Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
10. Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial, melalui kegiatan; Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan; pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Data Kalimantan

Timur; menyusun Data Pembangunan Kaltim 2015; menyusun Analisis PDRB Lapangan Usaha dan PDRB Penggunaan; menyusun Indikator Kinerja Daerah; menyusun Analisis Data Pembangunan Kaltim; menyusun laporan Triwulanan Kinerja Perekonomian; Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah berupa Aplikasi Pengembangan SIPPD, One Data One Map; pengadaan sarana dan prasarana penunjang Ruang Data Center; pengadaan Software GIS Advanced yang berlisensi untuk Geospatial Operation; Publikasi Informasi pembangunan

4.1.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Saat ini penataan PTSP yang menjadi Program Prioritas RPJMD Provinsi Kaltim belum berjalan optimal karena belum ditetapkannya pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 tahun 2014 melalui Peraturan Pemerintah.
2. Penerapan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat masih belum optimal, hal ini disebabkan masih belum banyak SKPD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang melakukan pengukuran mengenai IKM karena adanya kebijakan yang menyatakan bahwa kebijakan tentang IKM ini tidak berlaku lagi yaitu dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2014, dan petunjuk teknis tentang Survey Kepuasan Masyarakat masih belum ada.
3. Reformasi pelayanan sektor publik masih belum optimal disebabkan oleh : Pemahaman daerah terhadap SPM masih terbatas, definisi operasional indikator SPM diartikan berbeda dan tidak seragam sebagai akibat kurangnya sosialisasi dan fasilitasi teknis lainnya dari Pemerintah Pusat dan sering terjadinya mutasi pejabat yang menangani SPM. Di samping

itu, daerah belum bisa menyusun perhitungan perhitungan pembiayaan SPM dgn baik, disebabkan manual Pembiayaan SPM di daerah masih belum tersedia secara lengkap.

4. Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terkendala oleh; belum sepenuhnya diterapkan SKPD; sasaran dalam RPJMD maupun Renstra SKPD belum seluruhnya berorientasi hasil dan dilengkapi dengan indikator kinerja utama yg relevan dan terukur; Penetapan kinerja (PK) belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
5. Masih belum lengkapnya regulasi di dalam penerapan Akuntansi Berbasis akrual ; Sistem aplikasi pengelolaan keuangan masih belum up date dan belum terintegrasi satu sama lain ; Sumber daya manusia yang belum kompeten melakukan pengelolaan keuangan berbasis akrual.
6. Progres dan tindak lanjut E-PUPNS terkendala oleh masih terdapatnya pegawai ASN yang belum melakukan registrasi, dan masih ditemukan PNS ASN atau atasan langsungnya yang belum memahami dan melaksanakan secara konsisten terkait Penilaian Prestasi Kerja PNS.

b. Solusi

1. Diperlukan Tim panggar eksekutif dan legislatif memonitor dan mengevaluasi perencanaan dan pembiayaan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat yang terintegrasi dalam Renja SKPD guna peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik.
2. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota.
3. Peningkatan Komitmen pimpinan SKPD dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal termasuk dari segi pembiayaan.

4. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intens antar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian lainnya serta Pemerintah Daerah terkait dengan penyusunan indikator SPM.
5. Pengembangan kapasitas SKPD dalam menyusun rencana aksi perhitungan target pencapaian SPM.
6. Perlu pendampingan Pemerintah Pusat dalam penyusunan profil pelayanan dasar/Base Line kepada Pemerintah Daerah.
7. Menyiapkan database profil pelayanan dasar secara akurat.
8. Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, pengukuran kinerja secara berkala; Evaluasi program belum dilaksanakan dalam rangka untuk menilai keberhasilan program, memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja, menggunakan hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai alat perbaikan penerapan manajemen kinerja.
9. Menerapkan integrasi aplikasi di Tahun 2016.



Misi 5 : Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim

Misi kelima ini dijabarkan dalam 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran. Tujuan tersebut adalah Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan dua sasaran diantaranya adalah (1) Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan, (2) Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca.

Capaian sasaran misi 5 pada tahun 2015 kurang menggembirakan. Pola pembangunan ekstratif terhadap sumber daya alam telah menyebabkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan serta tingginya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan. Tercatat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Timur terhitung pada nilai 78,29 telah mencapai target 79,24. Permasalahan utama rendahnya indeks kualitas lingkungan tersebut adalah karena disebabkan oleh rendahnya tutupan lahan akibat pembukaan lahan sebagai manifestasi dari penerbitan ijin kegiatan

pertambangan dan perkebunan sehingga menyebabkan kualitas dan kuantitas ketersediaan air baku menjadi menurun.

Tabel 4.16.
Capaian Sasaran Misi 5 : Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	STATUS CAPAIAN	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan	79,24	78,29*	Tercapai (achieve)	
2.	Intensitas Emisi	1458	1300	Tercapai (achieve)	

*Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan BPS Provinsi Kalimantan Timur *) data tahun 2014, **) data SKPD*

Disisi lain laju deforesterasi (41.817 ha/tahun) yang lebih tinggi dari kemampuan kita untuk melakukan rehabilitasi lahan menyebabkan Kalimantan Timur merupakan provinsi penyumbang emisi gas rumah kaca ke 4 terbesar dari 34 provinsi di Indonesia dengan rata rata 52,8 juta ton CO₂eq/tahun. Sebesar 73 % emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di Kalimantan Timur adalah berasal dari perubahan hutan dan lahan untuk pemanfaatan yang lain. Saat ini elastisitas emisi Kalimantan Timur mencapai 1.611 Ton CO₂eq/Juta \$ PDRB dan belum mencapai target untuk penurunan intensitas emisi sebesar 1.517 Ton CO₂eq/Juta \$ PDRB yang ditetapkan pada tahun 2014.

Permasalahan yang ditimbulkan akibat alih fungsi lahan (di sektor pertambangan, kehutanan dan perkebunan) tersebut tidak bisa terlepas dari tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola sistem perijinan tidak transparan dan akuntabel serta tumpang tindih lahan. Sementara yang dirasakan masyarakat secara langsung adalah kejadian banjir dikala hujan dan sulitnya mendapatkan air di kala musim kemarau.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan kerangka kerja yang dituangkan dalam RPJMD 2013-2018 untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca yang telah di implementasikan dengan berbagai program dan kegiatan. Strategi

Pembangunan Kalimantan Timur yang berkelanjutan dan Ramah Lingkungan telah dibuat dan telah mewarnai kebijakan dan arah pembangunan daerah, demikian pula strategi dan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca telah dihasilkan dan dilaksanakan, dimana strategi pembangunan tersebut memastikan pembangunan ekonomi dan pengurangan emisi dikuatkan dan dilaksanakan secara bersama. Bagi Kalimantan Timur yang sedang membangun, strategi yang dipilih adalah menciptakan dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki nilai ekonomi dan nilai tambah tinggi namun disisi lain menghasilkan emisi yang rendah.

Dalam rangka mendukung penurunan intensitas emisi Pada tahun 2014 telah dilakukan berbagai upaya antara lain :

- Melalui penerbitan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Dalam rangka penataan Penguatan pelaksanaan moratorium penerbitan izin tambang dan lahan gambut melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur tentang Penundaan ijin pertambangan;
- Program penanaman satu milyar pohon sejak tahun 2012 sampai tahun 2014 ini sebanyak 193.813.322 pohon;
- Program penanaman, reklamasi, dan rehabilitasi DAS prioritas sebanyak 2.728.105 pohon seluas 11.160 ha.

Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik dan Sehat Serta Berprespektif Perubahan Iklim diupayakan melalui pencapaian Prioritas 12: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

5.1. Prioritas 12: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

5.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan dilaksanakan melalui 10 program dan 43 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 22,404 Miliar.

Capaian prioritas ini adalah indeks kualitas lingkungan 78,29% mencapai target 79,24% dan intensitas emisi 1300 ton CO₂/PDRB US \$ juta mencapai target 1458 ton CO₂/PDRB US \$ juta.

Tabel 4.17.
Program Kegiatan Prioritas
terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Prioritas 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		
No	Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.1	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	
1.2	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR)	
1.3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang	
1.4	Rapat koordinasi tentang penataan ruang	
1.5	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.6	Survey dan pemetaan perencanaan tata ruang	
1.7	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten kota	
1.8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan tata ruang	
1.9	Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang	
1.10	Survey dan pemetaan pemanfaatan ruang	
1.11	Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang	
1.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan tata ruang	
1.13	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	
1.14	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	
1.15	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	
2	Program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
2.1	Kegiatan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup di sector pertambangan	
2.2	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) kelapa sawit,	

		HTI dan HPH	
	2.3	Pelaksanaan Penilaian Proper dan Pengawasan Kegiatan Usaha dan Jasa	
3	Program pengendalian pencemaran dan pengrusakan LH		
	3.1	Koordinasi penilaian langit biru	
	3.2	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	BADAN LINGKUNGAN HIDUP
	3.3	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	
	3.4	Pengkajian dampak lingkungan	
	3.5	Pengembangan produksi ramah lingkungan	
	3.6	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan	
	3.7	Rakor Regional Pengelolaan LH	
	3.8	Laboratorium Lingkungan	
	3.9	Pemantauan Kualitas Air Laut	
	3.10	Pemantauan Kualitas Air Sungai	
	3.11	Monitoring dan Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut	
	3.12	Rehabilitasi hutan dan lahan	
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		
	14.1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	
	14.2	Penilaian Kota Sehat/Adipura	
5	Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH		
	5.1	Pendidikan Lingkungan Hidup dan Pelatihan Adiwiyata	
6	Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan LH		
	6.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Ahli Lingkungan untuk Menangani Kasus-kasus Lingkungan	
7	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup		
	7.1	Penyusunan Perda/Pergub Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	7.2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	
	7.3	Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan	

		(NSDH) nasional dan daerah	
	7.4	Pengembangan SDM Pengelolaan LH	
	7.5	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
8	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim		
	8.1	Penurunan emisi sektor limbah, sektor energi dan sektor lahan	
9	Investasi emisi gas rumah kaca		
	9.1	Pengembangan Format & Pelaksanaan MRV (Pengukur-an, Pelaporan & Verifikasi) implementasi RAD GRK	
10	Program pengaruh perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah		BAPPEDA
	10.1	Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota	
	10.2	Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas "Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup" pada tahun 2015 rata-rata mencapai realisasi keuangan 83,38% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 96,39%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian peningkatan kualitas lingkungan hidup, adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, melalui kegiatan; penyusunan Legal Draft (Perda) Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR- KSP); penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR) Kawasan Perkotaan PKN (Samarinda – Balikpapan – Tenggarong – Bontang); penyusunan rancangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP); Rapat koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Pelatihan 120 Orang Aparat

dari Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perencanaan tata ruang; Survey, pemetaan dan penyusunan Data Base Perencanaan Tata Ruang dan Kawasan Strategis (Aplikasi GIS); Koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam lintas kabupaten/kota; Monitoring dan Evaluasi Penataan Ruang; Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang dengan Audit Pemanfaatan Ruang Kota Balikpapan; pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; pelatihan 100 Orang Aparat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengendalian pemanfaatan ruang (Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Calon PPNS); monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang provinsi dan kabupaten/kota; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peraturan Zonasi kawasan strategis provinsi; menyusun Naskah Akademis tentang peraturan zonasi Kawasan Strategis Provinsi; penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

2. Program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, melalui kegiatan; penilaian kinerja 111 perusahaan pertambangan; peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) terhadap 43 perusahaan kelapa sawit, HTI dan HPH; penilaian proper terhadap 40 perusahaan jasa dan industry.
3. Program pengendalian pencemaran dan pengrusakan LH, melalui kegiatan; pemantauan kualitas udara; pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup; Pengelolaan B3 dan Limbah B3; menyusun database amdal dan ijin lingkungan; pembinaan pelaksanaan manajemen penilaian komisi Amdal di Kabupaten/Kota; pembinaan produksi ramah lingkungan bagi industri kecil dan UMKM; menyusun Buku Perda No. 1 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kaltim dan Pedoman penanganan kasus-kasus lingkungan hidup Provinsi Kaltim; pembinaan laboratorium

lingkungan; Pemantauan Kualitas Air Laut di Balikpapan, Bontang dan Paser; Pemantauan Kualitas Air Sungai Sungai Mahakam, Belayan, Boh, Kelay, Kedang Kepala dan Segah; Monitoring dan Pengendalian Kerusakan Pesisir dan Laut; Penanaman bibit mangrove seluas 4 Ha sebanyak 40,000 Pohon; Identifikasi kerusakan mangrove di Kaltim; Inventarisasi pengendalian kerusakan hutan dan lahan.

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, melalui kegiatan; Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di Kota Bontang; Pembinaan dan Penilaian Adipura;
5. Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH, melalui kegiatan; Pendidikan Lingkungan Hidup dan Pelatihan Adiwiyata sertifikat dan figura Adiwiyata di 50 Sekolah; dan bantuan uang pembinaan adiwiyata mandiri bagi 10 Sekolah yang berprestasi.
6. Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan LH, melalui kegiatan peningkatan Kapasitas 86 Orang Tenaga Ahli Lingkungan untuk Menangani Kasus-kasus Lingkungan dalam bentuk pelatihan PPLHD dan PPNS.
7. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui kegiatan; Pengembangan data dan informasi lingkungan; menyusun data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah; menyusun dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD); Bimtek Adiwiyata kepada 40 orang Guru dan Aparatur BLH Kabupaten/Kota.
8. Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim, melalui kegiatan perhitungan penurunan emisi 3 sektor yaitu limbah, energi dan lahan.
9. Investasi emisi gas rumah kaca, melalui kegiatan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK); Bimtek PEP GRK kepada 25 orang Aparatur BLH.

10. Program pengaruh perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah, melalui kegiatan; Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kabupaten/Kota; Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca dengan melaksanakan Renstra Heart Of Borneo (HOB); pelatihan penghitungan Business as Usual (BAU) Base Line PNS kepada 20 Orang PNS; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (PEP RAD GRK).

5.1.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Belum ditetapkan RTRW Provinsi sebagai acuan untuk peraturan turunannya.
2. Pembinaan penataan ruang belum berjalan efektif dikarenakan perubahan penanggungjawab penataan ruang di daerah.
3. Belum optimalnya kesesuaian program pembangunan dengan RTRWP.
4. Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan penataan ruang di provinsi maupun kabupaten/kota

b. Solusi

1. Percepatan penetapan Perda RTRW Provinsi.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pembinaan dengan perluasan substansi dan target peserta pembinaan.
3. Penyiapan petunjuk operasionalisasi RTRWP (indikasi program dalam RTRWP) ke dalam pembangunan sektor.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dan perangkat pengawasan.

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan

1.1. Prioritas 3: Percepatan Pengentasan Kemiskinan

1.1.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan melalui 3 program dan 3 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,270 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah tingkat kemiskinan 6,23% melebihi dari target 5,75%.

Tabel 4.18.
Program Kegiatan Prioritas
terkait Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Prioritas 3 : Percepatan Pengentasan Kemiskinan			
No	Program / Kegiatan		SKPD
1	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan		DINAS KEHUTANAN
	1.1	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan	
2	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan		DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
	2.1	Demplot kawasan usaha agribisnis terpadu	
3	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan		DINAS PETERNAKAN
	3.1	Pelatihan keterampilan pengembangan budidaya ternak	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas "Percepatan Pengentasan Kemiskinan"

pada tahun 2015 rata-rata mencapai realisasi keuangan 95,16% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 99,29%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian percepatan pengentasan kemiskinan, adalah sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan, melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui Pelatihan okulasi durian dan inokulasi gaharu dan Fasilitasi Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan di 7 desa ;
2. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman, melalui kegiatan Demplot Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) yang dilaksanakan di Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, dan Penajam Paser Utara seluas 50 Ha, terdiri atas bantuan saprodi, alat & mesin pertanian, optimasi jaringan irigasi, pembuatan pintu air, dan jalan pertanian. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi percontohan agar kegiatan pertanian dapat dilakukan diversifikasi tanam antara tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan, sehingga hasil yang diperoleh dapat meningkatkan pendapatan petani.
3. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan, melalui kegiatan pelatihan keterampilan pengembangan budidaya ternak bagi 75 KK Peternak Miskin sebanyak di Kabupaten Kutai Timur, pelatihan pembuatan pakan kepada 15 KK di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung, 20 KK Desa tanjung labu Kecamatan Rantau Pulung, 20 KK Desa Margo Mulyo Kecamatan Rantau Pulung dan 20 KK desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon.

1.1.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Infrastruktur dilokasi pengembangan pertanian belum memadai sehingga menyulitkan dalam pemasaran, sedangkan produk pertanian memiliki sifat mudah rusak.
2. Masih rendahnya daya saing pertanian dibandingkan daya aktivitas lainnya.
3. Kurangnya infrastruktur irigasi dan tidak berfungsi dan rusaknya infrastruktur bangunan irigasi yang ada.
4. Tingkat pengetahuan masyarakat desa tentang pertanian modern masih kurang. Masyarakat terbiasa mengambil apa yang sudah disediakan alam sehingga agak sulit mengaplikasikan hasil pelatihan.
5. Lokasi beberapa desa jauh dan sulit dijangkau.

b. Solusi

1. Perbaiki infrastruktur di lokasi pengembangan sehingga hasil produksi dapat dipasarkan dalam keadaan baik.
2. Melakukan upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi. Upaya intensifikasi ditempuh melalui perbaikan input produksi yaitu sarana dan prasarana produksi, teknologi bercocok tanam dan peningkatan sumberdaya manusia petani serta peningkatan indeks pertanaman. Sedangkan upaya ekstensifikasi melalui perluasan lahan produksi dan mekanisasi pertanian pra dan pasca panen.
3. Mengadakan pelatihan yang dapat menumbuhkan budaya ekonomi produktif, disertai pemberian bantuan fasilitas berupa saprodi, serta dilakukan bimbingan secara rutin kepada perwakilan desa yang mengikuti pelatihan.
4. Ketersediaan 1 (satu) penyuluh di tiap desa diharapkan dapat membantu mendampingi perwakilan masyarakat yang telah mengikuti pelatihan.

1.2. Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

1.2.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaannya

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dilaksanakan melalui 1 program dan 5 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,243 Miliar.

Capaian prioritas ini adalah pendapatan per kapita Rp 61,17 juta melebihi dari target Rp 48,65 juta.

Capaian prioritas ini adalah paritas daya beli Rp 11,02 juta melebihi dari target Rp 724.450.

Tabel 4.19.
Program Kegiatan Prioritas
terkait Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Prioritas 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI
	1.1	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	
	1.2	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	
	1.3	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	
	1.4	Peningkatan Kontinuitas Pelaporan dan Pengolahan Data Statistik SIUP dan TDP	
	1.5	Kontak Dagang	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas "Pengembangan Ekonomi Kerakyatan" pada tahun 2015 rata-rata mencapai realisasi keuangan 91,98% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 93,11%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian pengembangan ekonomi kerakyatan, adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, melalui kegiatan; Pengembangan pasar dan distribusi

barang/produk melalui Pasar Murah 15 Lokasi di kota Samarinda dan 15 Lokasi di Kutai Kertanegara; pameran hasil-hasil produk pangan Kaltim; Penanganan Jalur Distribusi Kebutuhan Pokok dan Strategis; Pengembangan pasar lelang daerah; pemantauan perkembangan harga; penyusunan Laporan Data Statistik Perkembangan SIUP dan TDP; penerbitan 4.259 lembar SIUP Usaha Mikro, Perusahaan Kecil, Perusahaan Menengah dan Perusahaan Besar; promosi melalui website, facebook, instagram, temu usaha; mengadakan pertemuan antara Pelaku usaha kalimantan Timur dan Jawa Timur.

1.2.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Distribusi bahan pokok strategis masih belum lancar terutama daerah pedalaman/perbatasan.
2. Pada kegiatan pasar lelang terjadi negosiasi dengan buyer, namun belum sampai tahap transaksi dikarenakan jumlah komoditi tidak mencukupi, kualitas komoditi berbeda dgn contoh dan waktu.
3. Pemenuhan kebutuhan pokok masih mengandalkan dari luar Kaltim.
4. Untuk penerbitan SIUP dan TDP, data dari kab/kota yang seringkali lambat dan tidak konsisten.
5. Kantor Perwakilan Dagang masih kesulitan dalam mendapatkan informasi lengkap tentang data pengusaha di Kaltim serta komoditi nya.

b. Solusi

1. Prognosa kebutuhan pokok dan strategis serta kordinasi dengan instansi terkait untuk jalur distribusi ke daerah pedalaman/perbatasan.

2. Berkordinasi dengan instansi terkait untuk permasalahan pemenuhan komoditi agro yang seringkali tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha ketika terjadi permintaan komoditi.
3. Berkordinasi dengan instansi terkait untuk prognosa stok kebutuhan pokok/strategis .
4. Berkordinasi dengan kab/kota untuk permasalahan SIUP dan TDP
5. Terus berkordinasi dengan penanggung jawab kantor dagang untuk memenuhi kebutuhan informasi.

1.3. Prioritas 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi

1.3.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 6 : Transformasi Ekonomi dilaksanakan melalui 10 program dan 12 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21,615 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah pertumbuhan ekonomi dengan migas -1,46% yang tidak mencapai target 3,2 – 3,7; pertumbuhan ekonomi dengan non migas -1,63% yang tidak mencapai target 7,0 – 7,3; dan pertumbuhan ekonomi dengan non migas dan non batubara 4,14% yang akan mencapai target 7,7 – 8,0.

Tabel 4.20.
Program Kegiatan Prioritas terkait Transformasi Ekonomi

Prioritas 6 : Percepatan Tranformasi Ekonomi			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Pengembangan Sentra Industri Potensial		DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM
	1.1	Tidak ada	
2	Program Penataan Struktur Industri Hulu Hilir		
	2.1	Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu-Hilir	
3	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional		

	3.1	Koordinasi Pengelolaan Isu-Isu Perdagangan Internasional	
4	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor		DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM Dan UPTD BALAI PENGUJIAN SAN SERTIFIKAT MUTU BARANG)
	4.1	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	
	4.2	Membangun Jejaring Dengan Eksportir	
	4.3	Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha	
	4.4	Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor Dan Impor	
5	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		
	5.1	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	
6	Program Perluasan Kebun Sawit		DINAS PERKEBUNAN
	6.1	Ekstensifikasi perkebunan sawit	
7	Program Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah		
	7.1	Tidak ada	
8	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		DINAS PETERNAKAN
	8.1	Pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan	
9	Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	9.1	Penyusunan Masterplan Kawasan Industri Pariwisata Derawan	
	9.2	Penyusunan Masterplan Kawasan Industri Pariwisata Derawan	
10	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		
	10.1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018,dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Transformasi Ekonomi” pada tahun 2015

rata-rata mencapai realisasi keuangan 75,09% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 87,17%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian tranformasi ekonomi, adalah sebagai berikut :

1. Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir, melalui kegiatan penyusunan Laporan Evaluasi dan Koordinasi Investasi di KIPI Maloy ; Laporan Hasil Forum Potensi dan Peluang Investasi di KIPI Maloy ; Laporan Evaluasi dan Koordinasi Pembangunan Pelabuhan di Teluk Golok.
2. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional, melalui kegiatan; Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor & Impor; Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri (Asean Economic Community 2015); Monitoring dan Pengendalian Ekspor, Impor dan Lintas batas.
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, melalui kegiatan; pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri melalui Sinergi Penerbitan SKA dan Elektronik SKA Se Kaltim ; Pengembangan Sistem Informasi & Data Base Ekspor Direktori Kinerja Eksportir/Importir; penerbitan 4.765 Surat Keterangan Asal (SKA) Barang dengan 3 besar negara tujuan ekspor yaitu India, Jepang dan Korea Selatan; Membangun jejaring dengan eksportir melalui Informasi Produk UKM Komoditi Ekspor yang dikirim ke Negara Turki dan Jepang; Fasilitasi Akses Pasar Luar Negeri; Kajian dan Pengembangan informasi peluang pasar pasar luar negeri; Koordinasi pengembangan Produk Ekspor dan Investasi Daerah (PEPIDA); Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor Dan Impor.
4. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, melalui kegiatan pelatihan pengembangan Produk Anyaman dan Desain Produk kepada 100 orang.
5. Program Perluasan Kebun Sawit, melalui kegiatan; Ekstensifikasi perkebunan sawit 800 Ha; pelatihan teknik budidaya sawit kepada

750 Orang ; Intensifikasi Kelapa Sawit 300 Ha; Ekstensifikasi Perkebunan Sawit Pola Perkebunan Inti Rakyat seluas 800 Ha.

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan, melalui kegiatan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan melalui bimbingan teknis 20 orang Pelaku usaha pengolahan hasil peternakan; dana pembinaan kepada 8 kelompok masyarakat berprestasi dalam olahan produk hasil peternakan; fasilitasi promosi produk olahan hasil peternakan untuk 50 kelompok; Festival olahan hasil peternakan, Sosialisasi publik awareness peduli asuh dan zoonosis serta Pameran luar daerah; bantuan sarana pengolahan hasil telur dan daging 3 unit;
7. Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan, melalui kegiatan penyusunan Masterplan Kawasan Industri Pariwisata Derawan dan Sekitarnya ; Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata melalui Pembangunan Pintu Gerbang di Objek Wisata Labuan Cermin, Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau.
8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, melalui kegiatan Gelar Produk Wisata; Rakernis Kebudayaan dan Pariwisata; Rapat Koordinasi WTW E; dan Workshop Pengemasan Produk Wisata.

1.3.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Belum ada legalitas lahan dalam bentuk sertifikat Khusus kawasan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, dan belum terbitnya ijin AMDAL dikarenakan belum disahkannya RTRW Kutim.
2. Permasalahan yang dihadapi pelaku usaha potensi ekspor masih terkendala dengan kualitas, dan jaminan kesinambungan ketersediaan komoditi.

3. Infrastruktur yang masih belum mendukung untuk proses hilirisasi dan disverifikasi produk, sehingga produk yang ada tidak bertambah.
4. Masih adanya bahan baku dan produk potensi ekspor (CPO) yang diantarpulaukan.
5. Kegiatan perluasan kebun sawit terkendala oleh ketersediaan bibit legal yang berasal dari sumber benih.
6. Permasalahan program Program Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah minimnya infrastruktur dan tingginya biaya transportasi menuju destinasi wisata.
 - Masih rendahnya peran aktif swasta dan masyarakat, lembaga pendidikan dalam mendukung Sapta Pesona yang terdiri dari Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahan, dan Kenangan.

b. Solusi

1. Diperlukan kebijakan khusus untuk penyelesaian permasalahan pertanahan di kawasan industri
2. Harus dilakukan kordinasi yang lebih intensif dalam rangka penyelsaian RTRW Kutai Timur terutama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Diperlukan dukungan instansi terkait dalam upaya peningkatan infrastruktur
4. Diperlukan sinergi dinas/instansi terkait, dalam upaya memperoleh data akurat perdagangan antar pulau sebagai data pendukung realisasi ekspor Kaltim.
5. Diperlukan pembinaan dalam upaya disverifikasi produk.
6. Melakukan pengawasan terhadap peredaran benih serta pembinaan terhadap penangkar benih di Kalimantan Timur agar dapat meminimalisir peredaran bibit ilegal yang dapat merugikan pekebun.
7. Fokus pembangunan Pariwisata Kalimantan Timur adalah pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana destinasi

wisata, kajian pengembangan potensi dan penyediaan SDM untuk pengembangan pariwisata di Kepulauan Derawan dan sekitarnya.

- Sinergitas dan peran pemerintah, swasta dan masyarakat lembaga pendidikan dalam mendukung Sapta Pesona pariwisata.

1.4. Prioritas 7 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan

1.4.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 7 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan dilaksanakan melalui 4 program dan 4 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42,128 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB 7,34% melebihi dari target 7%.

Tabel 4.21.
Program Kegiatan Prioritas terkait Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan

Prioritas 7 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan			
No		Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Diversifikasi Energi		DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
	1.1	Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	
2	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan		DINAS PETERNAKAN
	2.1	Pengembangan teknologi peternakan tepat guna	
3	Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan		DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
	3.1	Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	
4	Program pengembangan listrik pedesaan		
	4.1	Pembangunan sarana listrik pedesaan	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan” pada tahun 2015 rata-rata mencapai realisasi keuangan 94,10% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 94,93%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan, adalah sebagai berikut :

1. Program Diversifikasi Energi, melalui kegiatan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan dalam bentuk pemasangan PLTS tersebar di Kabupaten Kutai Barat berjumlah 710 unit, 1 unit PLTS terpusat kapasitas 35 kWP di Kabupaten Kutai Barat Kecamatan Siluq Ngurai Desa Kendesiq dan 1 unit kapasitas 115 kWP di Kabupaten Mahakam Ulu Kecamatan Long Hubung Desa Mamahaq Teboq; Pembangunan 100 unit biodigester di Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Panajam Paser Utara; penyusunan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH); pelatihan dalam pemeliharaan PLTS Tersebar kepada 76 orang; penyusunan database EBT dan Ketenagalistrikan.
2. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan, melalui kegiatan pembangunan Instalasi Biogas yang diserahkan ke masyarakat 105 unit.
3. Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, melalui kegiatan Audit Instalasi Listrik Gedung Pemerintahan di Provinsi Kaltim pada SKPD Badan Perpustakaan, Dinas Sosial, Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah, BLH, dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
4. Program pengembangan listrik pedesaan, melalui kegiatan perencanaan Jaringan Distribusi di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.

1.4.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Keterbatasan tenaga/aparat peternakan di kabupaten/kota yang mendukung pengembangan teknologi biogas.
2. Pengembangan PLTS masih menghadapi kendala dalam mobilisasi pada daerah yang sulit dijangkau karena keterbatasan transportasi dan kurangnya upaya pemeliharaan oleh masyarakat pengguna.

b. Solusi

1. Peningkatan peran aktif tenaga/aparat di kabupaten/kota yang mendukung pengembangan teknologi biogas.
2. Pengembangan PLTS masih menghadapi kendala dalam mobilisasi pada daerah yang sulit dijangkau karena keterbatasan transportasi dan kurangnya upaya pemeliharaan oleh masyarakat pengguna.

1.5. Prioritas 8 : Pengembangan Agrobisnis

1.5.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 8 : Pengembangan Agrobisnis dilaksanakan melalui 4 program dan 4 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21,154 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah rasio pemenuhan beras 70,17% mencapai target 78%.

Tabel 4.22.

Program Kegiatan Prioritas terkait Peningkatan Produksi Pangan

Prioritas 8 : Pengembangan Agrobisnis		
No	Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	DINAS PERKEBUNAN
1.1	Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	

2	Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan		DINAS PETERNAKAN
	2.1	Pengembangan kawasan sapi potong dan komoditas unggulan	
3	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.1	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas		DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM
	4.1	Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri olahan non migas	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018,dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Pengembangan Agrobisnis” pada tahun 2015 rata-rata mencapai realisasi keuangan 88,87% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 88,93%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian pengembangan agrobisnis, adalah sebagai berikut :

1. Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit, melalui kegiatan ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan melalui pengadaan Bibit karet 200.000 Batang (400 Ha), Bibit lada 100.000 Batang (50 Ha), Pupuk Nitrogen Phosphat dan Kalium (NPK) karet 64.000 Kg, Herbisida 2.250 Liter, Pelatihan petani karet sebanyak 300 orang, pelatihan petani lada sebanyak 25 orang, sosialisasi bantuan karet sebanyak 125 orang, Pertemuan Teknis, Perluasan areal, Pertemuan Koordinasi penyiapan lahan, petunjuk pelaksanaan ekstensifikasi penanaman baru komoditi perkebunan.

2. Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, melalui kegiatan pengembangan kawasan sapi potong dan komoditas unggulan 105 ekor sapi; Jumlah ternak untuk pengembangan sapi di kawasan sawit (Paser,Kutim,Kukar,Berau) 700 ekor; Jumlah ternak untuk pengembangan sapi dilahan Ex Tambang (Kukar, Samarinda, Kubar) 200 ekor; Obat-obatan ternak 9 jenis; Jumlah peternak yang dilatih 161 orang; Alat peternakan untuk pemberdayaan peternak 5 jenis ; Alat peternakan untuk peternakan pasca tambang di Samarinda, Kukar, Kubar 5 jenis ; Alat Peternakan untuk pengembangan ternak sapi di 4 kabupaten (Paser, Samarinda, Kukar, Kubar) 5 jenis.
3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan, melalui kegiatan promosi Investasi/Pameran/Expo; penyusunan Apresiasi dan Konsolidasi data dan statistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Temu Teknis pengembangan informasi pasar dalam negeri; pembinaan sarana dan prasarana produk perikanan non konsumsi; pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN); Bimbingan Teknologi Pengolahan Bernilai Tambah; Bimbingan Teknologi Pengemasan Produk; penerapan Sistem Rantai Dingin (CCS) dan Pengolahan Hasil; Pengawasan dan Pengujian mutu produksi perikanan pada berbagai jenis olahan dengan pemeriksaan mikrobiologi, pengujian mikro lengkap, organoleptik dan antibiotik.
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas, melalui kegiatan koordinasi peningkatan dan pengembangan industri olahan non migas yang memiliki nilai tambah, berasal dari sumber daya alam lokal yang diikuti dengan peningkatandan penyerapan SDM lokal yang kompeten, penguasaan tehnologi, mencapai keunggulan komptetitif dan berbwawasan lingkungan dengan keterkaitan industri hulu hilir; Kajian Hilirisasi Industri Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah; forum-forum kordinasi industri pengolahan non migas.

1.5.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Nilai ekspor sangat dipengaruhi terhadap inflasi nilai tukar rupiah terhadap dollar, sektor perikanan sangat diuntungkan apabila nilai dollar mengalami penguatan terhadap rupiah, hal tersebut akan meningkatkan nilai tukar produk hasil perikanan.
2. Belum adanya industri olahan barang jadi hanya sebatas menjual komoditas.
3. Pemenuhan Bahan Baku untuk kesinambungan pertumbuhan dan perkembangan industri.
4. Produk yang dihasilkan belum memperhatikan kebutuhan pasar.
5. Infrastruktur yang belum memadai untuk pengembangan industri olahan non migas.

b. Solusi

1. Mendorong diversifikasi produk olahan perikanan dalam meningkatkan upaya ekspor yang lebih tinggi pada Tahun 2016
2. Menarik investor untuk berinvestasi di industri olahan.
3. Meningkatkan kordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemenuhan bahan baku untuk pertumbuhan dan perkembangan industri non migas.
4. Pengembangan teknologi tepat guna dalam rangka pengembangan produk yang dihasilkan
5. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka tersedianya infrastruktur bagi penumbuhan dan perkembangan industri non migas.

1.6. Prioritas 9 : Penguatan Cadangan Pangan/Peningkatan Produksi Pangan

1.6.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaan

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 9 : Penguatan Cadangan Pangan/Peningkatan Produksi dilaksanakan melalui 9 program dan 22 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 135,843 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah bauran energi baru terbarukan 1,01% mencapai target 1,12%.

Tabel 4.23.
Program Kegiatan Prioritas terkait
Penguatan Cadangan Pangan/Peningkatan Produksi Pangan

Prioritas 9 : Penguatan Cadangan Pangan/Peningkatan Produksi Pangan		
No	Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN; UPTD BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA; UPTD BALAI BENIH INDUK PADI DAN PALAWIJA; UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
1.1	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
1.2	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	
1.3	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	
1.4	Pengembangan Tanaman Pangan	
1.5	Pengembangan Tanaman Hortikultura	
1.6	Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN;

	2.1	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	UPTD BALAI BENIH INDUK PADI DAN PALAWIJA
	2.2	Pelatihan Dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
	2.3	Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Modern Bercocok Tanam	
	2.4	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.1	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	
	3.2	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	
	3.3	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	
	3.4	Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	
4	Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan		DINAS PETERNAKAN
	4.1	Pengembangan agribisnis peternakan	
	4.2	Pengembangan Perbibitan dan Budidaya	
5	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, Dan Air Tawar		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN; UPTD BALAI BENIH SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR; UPTD BALAI BENIH SENTRAL AIR TAWAR SEBULU;
	5.1	Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar	
6	Program Pengembangan Perikanan Tangkap		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	6.1	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	

	6.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	
7	Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian		DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
	7.1	Pengembangan Sentra Tanaman Padi, Palawija Dan Hortikultura	
8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		UPTD BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA; DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN; UPTD BALAI PELATIHAN PERTANIAN; BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
	8.1	Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis	UPTD BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA; DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN; UPTD BALAI PELATIHAN PERTANIAN;
	8.2	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Penguatan Cadangan Pangan/Peningkatan Produksi Pangan” pada tahun 2015 rata-rata mencapai realisasi keuangan 80,24% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 87,37%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian penguatan cadangan pangan/peningkatan produksi pangan, adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan, melalui kegiatan :

- Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Buah-buahan 5000 batang ; Data base pengembangan benih unggul hortikultura; Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan hortikultura dan tanaman pangan; pembangunan 4 unit Gudang Benih, 4 unit Lantai Jemur; Pengembangan Penangkar Benih Kedelai 100 Ha;; Bantuan Benih 200.000 stek dan pupuk untuk demplot pengembangan

ubi kayu dilahan terdegradasi; Pohon induk tanaman hias anggrek dan non anggrek 200 pohon; Perbanyak benih unggul tanaman Rambutan 5.000 ph, Durian 10.000 ph, Lai 10.000 ph, Duku 1.000 ph, register pohon Induk buah-buahan 50 ph, Indeksing jeruk 50 ph dan perbanyak tanaman duplikat buah-buahan 200 ph ; perbanyak benih sumber padi 3 ha, jagung 1 ha, kacang tanah;; penumbuhan penangkar di 10 lokasi; perbanyak benih palawija seluas 5 ha; pelatihan penangkar benih padi dan palawija 60 orang ; penumbuhan penangkar 250 orang ;

- Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija melalui pembangunan Jalan Pertanian 45 km tersebar di kabupaten/kota; Pintu Air 26 unit, Optimasi Lahan di Kabupaten Paser 150 Ha;
- Pengembangan tanaman pangan melalui bantuan Saprodi pengembangan padi mayas, serai, thaihome, kayan, gedagai dan abung seluas 365 Ha tersebar di kabupaten/kota; bimbingan teknis pengembangan hortikultura kepada petani; Data base pengembangan hortikultura ; Saprodi Pengembangan Kawasan Hortikultura buah buahan 450 Ha tersebar di kabupaten/kota; Saprodi Pengembangan Kawasan Hortikultura Cabe 20 unit;; Saprodi Pengembangan Anggrek Vanda Dauglas & Media Tanam 600 pot; Saprodi pengembangan bawang merah 11 Ha; bantuan 16.000 Tabulapot cabe; Kendaraan Roda 4 (Truk) alat angkut pisang di kabupaten Kutim ; Benih kelengkeng 2.250 pohon; Benih manggis 500 pohon; Saprodi demplot pengembangan tanaman buah 12 Ha; Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan; peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ perkebunan melalui Demplot/kaji terap 3 lokasi; Demplot Tanaman Jelay; Demplot Kentang Udara; pelatihan SDM Penyuluh/Petugas Pertanian Kaltim 180 orang; penyusunan Juklak pembinaan penyuluh; Pengembangan Sistem Informasi Penyuluhan.

2. Program Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan, melalui kegiatan pengadaan Sarana Penunjang Pertanian Hand Traktor type rotary 5 unit, Rice Transplanter 2 unit, Hand Traktor type singkal 45 unit; Sarana Penunjang Pertanian Pompa Air 17 unit; Sarana Penunjang Pertanian Harvester Combine/Alat Panen 4 unit ; Sarana Penunjang Pertanian Terpal 100 lembar, Hand Sprayer 50 unit, Power Thresher 47 unit; pengadaan Pestisida (Insektisida : 1.000 lt, Fungisida :450 kg, Rodentisida : 500 kg, Moluskisida : 2.000 kg, Herbisida : 1.200 lt) ; Pengadaan power weeder (penyiang gulma) 2 unit ; Pengadaan seed cleaner kedelai 1 unit ; Pengadaan mesin panen 1 unit ; Pelatihan dan bimbingan pengoperasian Operator Traktor Roda 2 (hand traktor) kepada 80 orang petani; Pemeliharaan demplot buah naga organik di Kec. Muara Badak 200 pohon; bantuan peralatan dan Sarana Kerja RPH kepada kelompok tani; bantuan dana pembinaan kepada petugas lapang dan petani yang berprestasi di bidang Perlindungan Tanaman; Pelatihan Pengenalan dan Pengendalian OPT Pangan, Hortikultura dan Pengendali Hama; Bantuan bibit tanaman pengembangan Agens Hayati/PPAH kepada 10 kelompok;
3. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, melalui kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi berupa Kesepakatan Bersama dengan Provinsi Lain (Jatim, Jateng, Jabar); Penyusunan Study Pengembangan Cross Border Trade Transmigration Area di Mahakam Hulu; pembangunan fasilitas umum di kawasan Permukiman Transmigrasi; Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Ketramigrasian; Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi Nelayan Pulau Terluar Kabupaten Berau; penggerakan dan fasilitasi perpindahan serta

penempatan 100 KK transmigrasi; Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Maloy.

4. Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan, melalui kegiatan:

5.1 Pengembangan agribisnis peternakan melalui Peningkatan populasi Sapi Bakalan 150 ekor; Peternak yang dilatih 70 orang; Jumlah peternak yang menerima sapi bakalan di Balikpapan 35 orang; Jumlah peternak yang menerima sapi bakalan di Samarinda 35 orang; peralatan peternakan untuk penggemukan sapi sebanyak 2 paket untuk Balikpapan dan Samarinda; Jumlah kelompok tani berprestasi yang mendapatkan dana pembinaan 12 kelompok; Jumlah petugas peternakan berprestasi yang mendapatkan dana pembinaan 3 orang;

5.2 Pengembangan Perbibitan dan Budidaya melalui pengadaan Sapi Brahman Cross yang di impor (Berau 150 ekor, Kubar 50 ekor, Kukar 150 ekor, Kutim 150 ekor, Paser 200 ekor, PPU 150 ekor, Samarinda 100 ekor); Pengadaan bibit rumput 40 Ha sebanyak 400.000 stek/pols; Pengembangan babi 125 ekor; Bantuan kandang untuk kelompok peternak perbibitan berprestasi di sungai siring samarinda (1 kelompok); Bantuan kandang untuk kelompok peternak plasma nutfah ayam nunukan di samarinda (1 kelompok); Jumlah Peternak berprestasi untuk ternak unggulan yang mendapatkan dana pembinaan 40 orang;

5. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar, melalui kegiatan peningkatan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana budidaya.

6. Program pengembangan perikanan tangkap, melalui kegiatan; pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap; Bimtek Laminasi dan Palkanisasi Kapal Perikanan kepada 30 orang Kelompok Usaha Bersama; Kelompok Usaha Bersama yang Mengikuti Apresiasi KUB Mandiri 10 orang; Nelayan yang Mengikuti Up Grading SKK 60 Mil atau 30 Mil menjadi Ankapin III 30 orang; bantuan Alat Tangkap Bubu 300 buah, Mesin Ketinting 30 unit dan Jaring Milenium 73 Piece; pengadaan Benih Ikan Air Tawar untuk Restocking di Perairan Umum Daratan (PUD) 100.000 ekor; Kapal Penangkapan Ikan Lebih Kecil Sama dengan 5 GT 14 unit; Mesin Kapal 90 unit; Perahu, Mesin Ketinting dan Alat Tangkap 33 unit; Alat Tangkap Gill Net 120 unit; Bubu Bambu 650 unit; Apartemen Ikan 100 modul; Peralatan Perbengkelan (Kompresor, Kunci Set, Mesin 24 PK) 10 buah; Alat Bantu Penangkap Ikan (Rawai) 1 unit; Alat Bantu Penangkapan Ikan 18 unit; Jaring Millenium 84 piece; Alat Tangkap Trammel Net 260 piece; Viesel Monitoring System (VMS) 4 unit; Life Jacket 550 buah; Sarana Penunjang Pangkalan Pendaratan Ikan (Timbangan Analog, Cool Box, Pemecah Es, Bucket Keranjang, Becak Dorong) 224 buah; Mesin Ketinting 23 unit; Peralatan Pengembangan Diversifikasi Usaha KUB 10 set; Drainase Pusat Pelatihan Perikanan Muara Badak 350 meter; Rehab PPI Kenyamukan di Kutai Timur.
7. Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian, melalui kegiatan pengembangan sentra tanaman padi, palawija dan hortikultura 4.310 Ha dan bantuan saprodi, alat dan mesin pertanian, di 8 (delapan) Kabupaten/Kota, 21 (dua puluh satu) Kecamatan dan 28 (dua puluh delapan) Desa.
8. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, melalui kegiatan; pelatihan 90 orang petani dan pelaku agribisnis; pelatihan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 330 petani di 6 Kawasan Sentra Tanaman Pangan; Peningkatan kemampuan

lembaga petani dengan melaksanakan pelatihan teknologi bagi Penangkar sebanyak 10 orang ; Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) berprestasi yang mendapatkan penghargaan (3 kelompok); Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis.

9. Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh, melalui kegiatan pengembangan Kelembagaan Penyuluh dengan pemberian Hadiah Pemenang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Berprestasi sebanyak 25 laptop.
10. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, melalui kegiatan; Identifikasi dan Intervensi Rawan Pangan di 6 Kabupaten ; Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) ; Analisis Peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas) ; penyusunan Juknis pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan /Laporan pekarangan untuk pengembangan pangan rumah tangga ; Buku Pekarangan ; Jumlah penerima bantuan Bibit Tanaman,pupuk, pestisida, polybag kepada 5 kelompok wanita tani; Pengembangan cadangan pangan daerah Pemerintah Provinsi Kaltim 115 ton ; Pengembangan 19 lumbung pangan desa.

1.6.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Dalam pelaksanaan kegiatan prioritas kelautan perikanan ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat aktifitas penangkapan pada saat musim kurang baik.
2. Keterbatasan Sistem Pengairan dan Infrastruktur Pendukung Belum Optimal, Sarana Produksi Pertanian Kurang Ketersediaannya, Luas Tanam dan Luas Panen Yang Belum Optimal serta Produktivitas Masih rendah.

3. SDM Petani, Penyuluh dan Petugas Terbatas bila dibandingkan dengan potensi lahan yang tersedia.
4. Ternak sapi Brahman Cross tidak dapat mencapai target karena adanya keterlambatan penerbitan pedoman umum mengenai sapi indukan, karena adanya revisi Permentan mengenai sapi indukan serta belum adanya fasilitas instalasi karantina hewan.
5. Infrastruktur dilokasi pengembangan pertanian belum memadai sehingga produk pertanian rusak.

b. Solusi

1. Pelaksanaan kegiatan (percontohan budidaya/sejenisnya) yang tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun 2015, akan lebih diprioritaskan pelaksanaannya pada saat musim penghujan.
2. Kegiatan yang menunjang pencapaian target produksi perikanan budidaya yaitu : Penerapan teknologi oleh Pembudidaya tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Penerapan pembenihan yang baik oleh UPR sehingga menghasilkan bibit yang berkualitas dan pemberian paket bantuan yang diberikan oleh dinas baik berupa bibit, pakan maupun sarana budidaya.
3. Dalam rangka menunjang peningkatan produksi perikanan tangkap perlu dilakukan peremajaan armada kapal tangkap yang lebih besar (5-30 GT) dan penggunaan alat tangkap yang lebih efisien serta harus ramah lingkungan.
4. Pembuatan Jaringan irigasi Tersier, Embung, Jalan Usaha Tani serta Jalan Produksi, Bantuan Saprodi, Alat dan Mesin Pertanian, Percetakan Sawah, Optimasi lahan, Perbaiki Teknologi Budidaya serta Pelatihan-Pelatihan Untuk SDM Pertanian lebih ditingkatkan.
5. Penyediaan sarana dan prasarana instalasi karantina hewan.

Misi 5 : Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim

1.7. Prioritas 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

1.7.1. Program Kegiatan dan Realisasi Pelaksanaannya

a. Program Kegiatan

Program kegiatan dalam upaya pencapaian prioritas 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 6 program dan 9 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5,347 Milyar.

Capaian prioritas ini adalah indeks kualitas lingkungan 78,29% mencapai target 79,24% dan intensitas emisi 1300 ton CO2/PDRB US \$ juta mencapai target 1458 ton CO2/PDRB US \$ juta.

Tabel 4.24.
Program Kegiatan Prioritas terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Prioritas 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		
No	Program / Kegiatan	SKPD
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN; UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS; UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan KPH	
2	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	DINAS KEHUTANAN
2.1	Penanaman 1 Juta Batang Bibit	
2.2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	DINAS KEHUTANAN; UPTD PENGELOLA TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO; UPTD PEMBINAAN DAN PELESTARIAN ALAM SAMARINDA

3	Rehabilitasi Hutan Mangrove		DINAS KEHUTANAN
	3.1	Rehabilitasi Hutan Mangrove	
4	Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi		
	4.1	Tidak Ada	
5	Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang		DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
	5.1	Pengawasan lingkungan pertambangan	
6	Program Pembinaan Perkebunan ramah lingkungan		DINAS PERKEBUNAN
	6.1	Pengembangan biomasa sebagai energi terbarukan dari perkebunan	
	6.2	Fasilitasi Intergrasi sawit sapi	
	6.3	Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	
	6.4	Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	

Sumber : RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2013-2018,dan RKPD Tahun 2015

b. Realisasi Pelaksanaan

Realisasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target prioritas “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” pada tahun 2015 rata-rata mencapai realisasi keuangan 91,48% dan rata-rata realisasi fisik mencapai 97,76%.

Hasil pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dalam upaya pencapaian peningkatan kualitas lingkungan hidup, adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH, melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi pembentukan KPHP; Rapat koordinasi/ konsultasi kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan KPH; Supervisi pelaksanaan kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); pembinaan &

pengamanan wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); Inventarisasi ijin-ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan; pembinaan dan pengawasan penatausahaan hasil hutan di 14; perlindungan pengamanan kawasan hutan (areal berijin dan tidak berijin) di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Hari Menanam Pohon Indonesia 2015 & Bulan Menanam Nasional 2015, melalui kegiatan; Penanaman 1 Juta Batang Bibit, pengadaan Pupuk Kandang sebanyak 1,500 Kg; Herbisida sebanyak 35 Liter; Rehabilitasi bagi Pemegang IPPKH Jalan Tol (Pemeliharaan Hutan Lindung Manggar) seluas 19 hektar; Reboisasi Pengkayaan (Pemeliharaan Tahun 1 Hutan Tahura Bukit Suharto) seluas 85 Hektar; Reboisasi Pengkayaan (Pemeliharaan Tahun ke 2 Tahura Bukit Suharto) seluas 20 Hektar; Bibit Endemik untuk lahan seluas 25 Ha dengan bibit sebanyak 1,500 Batang; Pupuk Kandang sebanyak 6,000 Kg; Penanaman Tahura Bukit Suharto; Pemeliharaan Tanaman Tahun ke 2 seluas 15 Ha; Pemeliharaan Tanaman Tahun ke 1 seluas 20 Ha; Sosialisasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Tahura Bukit Soeharto; Bibit untuk 10 hektar sebanyak 12,100 Batang; penanaman baru di Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 10 Hektar; Koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pengelolaan Tahura; Patroli pengamanan hutan, penyuluhan, inventarisasi, koordinasi, dan monitoring.
3. Rehabilitasi Hutan Mangrove, melalui kegiatan; pemeliharaan Tanaman Mangrove Tahun ke-2 di Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 20 Hektar.
4. Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang, melalui kegiatan pengawasan lingkungan pertambangan Batubara di 29 Perusahaan.

5. Program Pembinaan Perkebunan ramah lingkungan, melalui kegiatan; pengembangan biomasa sebagai energi terbarukan dari perkebunan dengan pengadaan alat pendukung biochar yang diserahkan kepada kelompok tani di Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 1 unit dan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur sebanyak 1 unit; pengawalan potensi POME 3 pabrik kelapa sawit di Kukar dan kutim; Fasilitasi Intergrasi sawit sapi dengan pengadaan Alat biogas sawit sapi di Kabupaten Kukar sebanyak 3 Unit; Alat chopper sawit sapi di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 3 Unit; Jumlah petani yang dilatih fasilitasi integrasi sawit sapi sebanyak 20 Orang; workshop manajemen perlindungan dan penerapan ekonomi hijau perkebunan; pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida pada produk perkebunan

1.7.2. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Proses penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (10 Tahun) dilaksanakan oleh UPT Kementerian (BPKH Wialyah IV) bersama Tim Ahli belum selesai sampai dengan saat ini dan belum disahkan.
2. Sulitnya mencari lahan *clear and clean* yang berada didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Khusus untuk pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan terkendala dengan perencanaan pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang orientasi pemanfaatannya kurang dari 5 tahun.
3. Target pemeliharaan tanaman pada rehabilitasi hutan dan lahan seluas 63,14 hektar hanya dapat dilakukan seluas 19 hektar yang disebabkan terjadi kebakaran hutan pada minggu kedua Oktober 2015 pada areal penanaman

dalam rangka Rehabilitasi DAS IPPKH Jalan Tol di Hutan Lindung Sungai Manggar seluas \pm 44 Hektar.

4. Khusus untuk pelaksanaan rehabilitasi didalam kawasan hutan mangrove terkendala dengan perencanaan pemanfaatan lahan oleh masyarakat.
5. Perusahaan pengembang energi terbarukan tidak dapat memanfaatkan biogas POME tanpa seijin PKS yang memproduksi limbah

b. Solusi

1. Percepatan proses penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang.
2. Meningkatkan peran serta atau partisipasi para pihak (perusahaan, SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk melakukan rehabilitasi mangrove, hutan dan lahan pada setiap acara yang dianggap penting.
3. Melakukan penanaman ulang pada areal penanaman dalam rangka Rehabilitasi DAS IPPKH Jalan Tol di HL. Sungai Manggar seluas \pm 44 Hektar pada Tahun 2016.
4. Melakukan koordinasi secara intensif dengan perusahaan pertambangan dalam kerja sama pembangunan melalui CSR yang di fokuskan pada pemberdayaan usaha ekonomi produktif masyarakat sekitar areal pertambangan.
5. Menyusun kebijakan yang lebih detail dalam rangka mendukung pengembangan energi baru terbarukan khususnya kewajiban bagi PKS dan dukungan distribusi jaringan dari PLN agar dapat meningkatkan kebutuhan listrik bagi pedesaan serta menurunkan intensitas emisi sebagai upaya mengatasi dampak perubahan iklim.